

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2016-2021**



**oleh:
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa menyertai dalam penyelesaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 memuat tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan, target dan indicator kinerja yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membangun sector transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 2016-2021, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 ini berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan perhubungan dan dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya sampai dengan tahun 2021.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021. Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang maksimal, pada kesempatan ini kami mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan perhubungan guna tercapainya sasaran pembangunan perhubungan yang telah ditetapkan.

Tenggarong, 23 September 2016

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Drs. H. Marsidik
Pembina Utama Muda
NIP. 19620403 198703 1 020



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Pesut RT.7 No.130 Kel. Timbau
Telp. (0541) 6667077, Fax. (0541) 6667052 / 6667183,
Email : dishub_kukar@yahoo.co.id, Website: dishub.kutaikartanegarakab.go.id
TENGGARONG - 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : 550/1807/DISHUB/IX/2016

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka bagi setiap Instansi Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing SKPD.
- b. Bahwa dalam rangka kaitannya dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka terjadi perubahan struktur organisasi pada setiap SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu adanya perubahan sistematika dalam penyusunan dokumen perencanaan.

- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun periode 2016 sampai dengan 2021.

Pasal 2

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara ini, maka Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015 menjadi tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada Tanggal : 23 September 2016

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Drs. H. Marsidik
Pembina Utama Muda
NIP. 19620403 198703 1 020

DAFTAR ISI

	Hlm.
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Keputusan Kepala Dinas	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar/Bagan	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	7
2.2. Sumber Daya SKPD Dinas Perhubungan	10
2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan	10
2.2.2. Sumber Daya Aset Perhubungan	12
2.2.3. Sumber Daya Keuangan	14
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ..	17
2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD	19
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	 23
3.1.1. Pelayanan Angkutan Jalan	23

3.1.2. Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	24
3.1.3. Pelayanan Angkutan Penyebrangan	25
3.1.4. Pelayanan Angkutan Laut	25
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26
3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian Perhubungan	32
3.4. Telaahan RENSTRA Dinas Perhubungan Prov.Kaltim	33
3.5. Telaahan RTRW Kab.Kutai Kartanegara	34
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	50
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perhubungan	50
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan	50
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan	54
4.3.1. Perumusan Strategi	54
4.3.2. Perumusan Kebijakan	57
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	64
5.1. Rencana Program dan Kegiatan	64
5.2. Indikator Kinerja	67
5.3. Kelompok Sasaran	70
5.4. Pendanaan Indikatif	70
5.5. Penerima Manfaat Pembangunan Bidang Perhubungan ...	72
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	74
6.1. Perumusan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	74
6.2. Indikator Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kab.Kutai Kartanegara	78
BAB VII PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Hlm.

Tabel Bab II:

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan	10
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Eselon	10
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan	10
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	11
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Usia	11
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Menurut Masa Kerja	11
Tabel 2.7	Jumlah Pegawai Berdasar Status Kepegawaian	12
Tabel 2.8	Data Aset Kendaraan Dinas/ Operasional	12
Tabel 2.9	Data Aset Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	12
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD tahun 2011-2015	15
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Tahun 2011-2015	16
Tabel 2.12	Macam Pelayanan Bidang Perhubungan yang dibutuhkan ...	17

Tabel Bab III:

Tabel 3.1	Arah Kebijakan Kewilayahan RPJMD bidang Perhubungan ..	29
Tabel 3.2	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah ...	42

Tabel Bab IV:

Tabel 4.1	Sasaran dari Tujuan dari Dinas Perhubungan	51
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2016 s/d 2021	52
Tabel 4.3	Rumusan Strategi Pencapaian Sasaran	54
Tabel 4.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	58

Tabel Bab V:

Tabel 5.1	Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan	67
Tabel 5.2	Sasaran Program Dinas Perhubungan	70
Tabel 5.3	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	71

Tabel Bab VI:

Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	75
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan	78

DAFTAR GAMBAR/ BAGAN

	Hlm.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	9

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1 Rincian Rencana Target Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016–2021
- Lampiran 2.1 Rincian Rencana Target Kinerja Program Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016–2021
- Lampiran 3.1 Penjabaran Tujuan, Sasaran, dan Program Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016–2021
- Lampiran 4.1 Pemetaan Kebutuhan Sarana, Prasarana, Fasilitas Perhubungan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013–2031
- Lampiran 5.1 Jadwal Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016–2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang dalam hal ini adalah perencanaan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021, yaitu sebagai tindak lanjut atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya memuat: gambaran pelayanan SKPD Dinas Perhubungan, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program kerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dalam pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur pelaksana pada jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu tahun 2016-2021.

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 (Nomor 3/2016, tanggal 16 Agustus 2016) dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kuta Kartanegara tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/ 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
10. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah:

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1999 tentang Angkutan Perairan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor.69 tahun 2001 tentang Kepelabuhan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dan Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

Peraturan Menteri Perhubungan

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
24. Kep. Menhub No.44 tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
25. Kep. Menhub No.48 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
26. Kep. Menhub No.15 tahun 1997 tentang Sistem Transportasi Nasional;
27. Kep. Menhub No.32 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyebrangan;
28. Kep. Menhub No.53 tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional;
29. Kep. Menhub No.11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan Penyebrangan yang diusahakan;
30. Kep. Menhub No.73 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

Permendagri:

31. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Permendagri 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah:

36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013 -2018;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
39. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
40. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan kejelasan

tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang perhubungan pada periode tahun 2016-2021, serta sebagai pelaksanaan Misi serta penjabaran Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 guna mendukung mewujudkan VISI Program GERBANG RAJA JILID II, yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, diantaranya adalah:

1. Sebagai acuan untuk penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang perhubungan tahun 2016-2021;
2. Sebagai acuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021;
3. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN; berisikan tentang:

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan tujuan; serta
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD; memuat keterangan tentang:

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2.2. Sumber Daya SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara; serta

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI; berisikan penjelasan tentang:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;

3.2. Telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan;

3.4. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; serta

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN; berisikan penjelasan tentang:

4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara; serta

4.2. Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF; memuat tentang:

5.1. Rencana Program dan Kegiatan;

5.2. Indikator Kinerja;

5.3. Kelompok Sasaran;

5.4. Pendanaan Indikatif; serta

5.5. Penerima Manfaat.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tugas Dinas Perhubungan adalah “melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perhubungan”.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perhubungan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati;

2.1.3. Struktur Organisasi

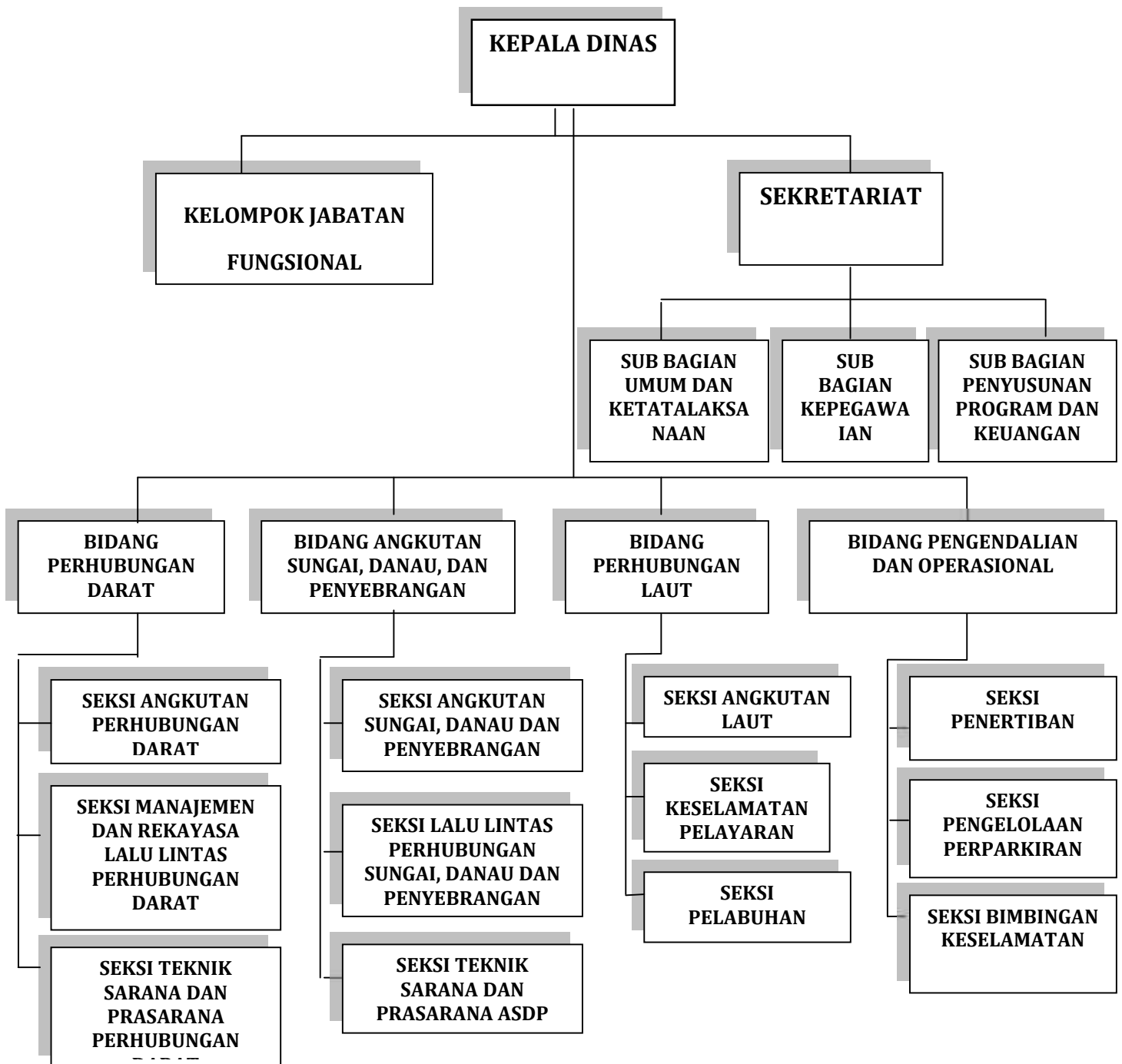
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
 - 1) Seksi Angkutan Perhubungan Darat;
 - 2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perhubungan Darat;
 - 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat.
- d. Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan;
 - 2) Seksi Lalu Lintas Perhubungan Sungai, Danau dan Penyebrangan;
 - 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana ASDP.
- e. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
 - 1) Seksi Angkutan Laut;
 - 2) Seksi Manajemen Keselamatan Pelayaran;
 - 3) Seksi Pelabuhan.
- f. Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahkan
 - 1) Seksi Penertiban;
 - 2) Seksi Pengelolaan Perpajakan;
 - 3) Seksi Bimbingan Keselamatan.
- g. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi di atas dijalankan oleh pejabat struktural eselon II yang menjabat sebagai Kepala Dinas, eselon III terdiri dari 5 (Lima) orang, yaitu 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang yang menjabat sebagai Kepala Bidang, kemudian eselon IV sebanyak 14 (empat belas) orang, yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dan 12 (dua belas) orang Kepala Seksi (Kasi).

Gambaran struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan

Kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Seksi	12
5	Staf	127
Jumlah		144

2) Jumlah Pegawai Menurut Eselon

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	12
4	Non Eselon	127
Jumlah		144

3) Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/C	1
2	Pembina Tingkat 1	IV/B	3
3	Pembina	IV/A	3
4	Penata Tingkat 1	III/D	6
5	Penata	III/C	7
6	Penata Muda Tingkat 1	III/B	13
7	Penata Muda	III/A	6
8	Pengatur Tingkat 1	II/D	4
9	Pengatur	II/C	2
10	Pengatur Muda Tingkat 1	II/B	50

11	Pengatur Muda	II/A	45
12	Juru	I/C	1
13	Juru Muda	I/A	1
Jumlah			144

4) Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pasca Sarjana / S2	9
2	Sarjana / S1	18
3	Diploma 3	4
4	SLTA / SMK / Sederajat	105
5	SLTP / SMP	3
6	SD	5
Jumlah		144

5) Jumlah Pegawai Menurut Usia

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Usia

No.	Jabatan	Jumlah
1	25 – 35 tahun	80
2	36 – 45 tahun	34
3	46 – 55 tahun	30
Jumlah		144

6) Jumlah Pegawai Menurut Masa Kerja

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Masa Kerja

No.	Jabatan	Jumlah
1	0 - 5 tahun	2
2	6 - 10 tahun	61
3	11 - 15 tahun	45
4	16 - 20 tahun	13
5	21 - 25 tahun	11
6	26 - 30 tahun	10
7	> 30 tahun	2
Jumlah		144

7) Jumlah Pegawai Berdasar Status Kepegawaian

Tabel 2.7

Jumlah Pegawai Berdasar Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	144
2	Honorer/Tenaga Harian Lepas (THL)	257
Jumlah		401

2.2.2. Sumber Daya Aset Barang Milik Daerah di Dinas Perhubungan

1) Aset Kendaraan Dinas/ Operasional

Beberapa asset kendaraan dinas/ operasional sebagai sarana penunjang kegiatan Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Data Aset Kendaraan Dinas/ Operasional

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi
1	Sepeda Motor CB150R	15 unit	Baik
2	Sepeda Motor (Vario dan Beat)	17 unit	Baik
3	Pick-Up	4 unit	Baik
4	Mobil Dinas Jabatan	5 unit	Baik
5	Mobil Derek	2 unit	Baik

2) Aset Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Beberapa asset sarana, prasarana, dan fasilitas perhubungan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

Data Aset Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kecamatan	Nama Aset	Ket
1	Tenggarong	1 Terminal Timbau	Berfungsi
		2 Terminal Tangga Arung	Berfungsi
2	Tenggarong Seberang	1 Dermaga Aji Imbut	Berfungsi
3	Samboja	1 Pelabuhan Amborawang Laut	Masih dibangun
4	Muara Jawa	1 Terminal Handil II	Berfungsi
		2 Dermaga Handil II	Berfungsi
5	Anggana	1 Dermaga Sungai Meriam	Berfungsi
		2 Dermaga Kutai Lama	Berfungsi
6	Muara Badak	1 Pelabuhan Muara Badak Ilir	Baru akan dibangun
		2 Terminal Muara Badak	Belum berfungsi
7	Sebulu	1 Dermaga Desa Sebulu Modern	Berfungsi
		2 Dermaga Desa Sebulu Hulu	Berfungsi
8	Muara Kaman	1 Dermaga Muara Kaman	Berfungsi
		2 Dermaga Muara Kaman Seberang	Berfungsi
9	Kota Bangun	1 Pelabuhan Kota Bangun	Belum difungsikan
		2 Dermaga Desa Rimba Ayu	Berfungsi
		3 Dermaga Kota Bangun Hulu	Berfungsi
		4 Dermaga Kota Bangun Seberang	Berfungsi
10	Muara Wis	1 Dermaga Muara Wis	Berfungsi
11	Kembang Janggut	1 Dermaga Kembang Janggut	Berfungsi
12	Tabang	1 Dermaga Tabang	Berfungsi
		2 Dermaga Desa Umaq Tukung	Berfungsi
		3 Dermaga Desa Umaq Dian	Berfungsi
		4 Dermaga Desa Ritan Baru	Berfungsi

2.2.3. Sumber Daya Keuangan

Sumber pembiayaan SKPD dalam penyelenggaraan urusan wajib perhubungan berasal dari alokasi anggaran pemerintah yang bersumber dari:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam rangka memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara diperoleh dari hasil retribusi daerah sektor perhubungan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 2) Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:
 - a. Retribusi Terminal-Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum
 - b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD Dinas perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode 2011-2015, menurut SPM untuk urusan wajib perhubungan, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dan/atau indikator lainnya. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Renstra tahun 2011-2015 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel. 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2011-2015

Terlampir di halaman berikutnya

Tabel. 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Tahun 2011-2015

Terlampir di halaman berikutnya

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil analisis Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim 2014-2018, dan hasil analisis terhadap RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013-2031, maka akan berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2016-2021. Berdasarkan hal tersebut akan dikemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan bidang perhubungan yang dibutuhkan, sebagai berikut:

Tabel 2.12
Macam Pelayanan Bidang Perhubungan Yang Dibutuhkan

No	Jenis Pelayanan	Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
1	Pengembangan jalur kereta api dengan tujuan memperlancar arus pergerakan penumpang dan barang	9 jaringan	Beberapa titik di Kabupaten Kutai Kartanegara
2	Pengembangan Bandar Udara untuk membantu pengembangan akses kabupaten	1 bandara	Loa Kulu
	Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan		
3	pengembangan terminal penumpang Tipe A	1 bangunan	Tenggarong
4	Optimalisasi terminal penumpang tipe C	6 Terminal	Marang Kayu, Terminal Tangga Arung Tenggarong, Kota Bangun, Muara Jawa, Muara Badak,
5	Pembangunan terminal penumpang tipe C	5 Terminal/ Kecamatan	Tenggarong Seberang, Samboja, Muara Kaman, Anggana, Muara Badak
6	Pembangunan terminal barang	6 Terminal	Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Tenggarong Seberang, Sebulu, Kota Bangun

	Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan		
7	Pelayanan trayek angkutan kota	12 Trayek	Tenggarong, Muara Badak, Muara Jawa, Kota Bangun, Loa Duri, Loa Janan, Samboja, Loa Kulu, Jahab, Sebulu Seberang, Pondok Labu, Jonggon. Loa Tebu
8	Pelayanan trayek angkutan bus antar Kabupaten dalam provinsi (AKDP) armada bus	1 Trayek	Samarinda-Kota Bangun
9	pelayanan trayek angkutan bus antar Kabupaten dalam provinsi (AKDP) armada mobil penumpang umum	4 Trayek	Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Muara Jawa
10	pengembangan pelayanan trayek angkutan barang peti kemas		Tenggarong
11	pengembangan pelayanan trayek angkutan barang non peti kemas		Tenggarong
	Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan		
12	Optimalisasi Pelabuhan	18 Pelabuhan	Muara Jawa, Anggana, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Muntai, Kota Bangun, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis,
13	Rencana Pembangunan Pelabuhan	9 Pelabuhan	Sebulu, Muara Wis, Muara Muntai, Tabang, Anggana, Muara Aloh, Loa Kulu, Kota Bangun
	Jaringan Perkeretaapian		
14	Pengembangan prasarana dan peningkatan pelayanankereta api	9 jaringan	Tenggarong, Kota Bangun, Samarinda, Tabang, Kembang Janggut, Muara Kaman, Sebulu, Muara Badak
	Transportasi Laut		
15	pengembangan prasarana pelabuhan laut dan terminal khusus		Marang Kayu, Samboja, Muara Jawa, Muara Badak, Anggana
	Transportasi Udara		

16	pengembangan tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan	6 Kecamatan	Loa Kulu, Kota Bangun, Kembang Janggut, Marang Kayu, Muara Badak, Samboja

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

Beberapa tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan pada Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya adalah:

- 1) Luasnya Wilayah geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 18 Kecamatan;
- 2) Tingginya tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang memadai;
- 3) Besarnya Penggunaan kendaraan pribadi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4) Kurangnya atau berkurangnya angkutan umum;
- 5) Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sehingga memberi dampak tingginya penggunaan kendaraan pribadi
- 6) Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang cukup besar dan adanya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;
- 7) Kurang optimalnya system perencanaan pembangunan di bidang perhubungan akan menjadi hambatan dalam pengusulan dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN bagi pembangunan sector transportasi di Kabupaten;
- 8) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas lalu lintas yang bisa mengakibatkan kondisi Lalu Lintas yang kurang aman, kurang nyaman, kurang tertib dan kurang terkendali sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- 9) Masih adanya temuan hasil pemeriksaan yang akan berpengaruh negatif bagi keberlangsungan organisasi;
- 10) Adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 11) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan;
- 12) Masih adanya angkutan umum/ darat yang kurang layak atau menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan asap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih;
- 13) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan;
- 14) Kebutuhan masyarakat akan pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang memadai;
- 15) Perlunya pengembangan sistem lampu penerangan jalan umum (LPJU) dari tenaga listrik menjadi tenaga Surya (solar Cell);
- 16) Kebutuhan masyarakat akan pentingnya ketersediaan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kukar
- 17) Prasarana dan fasilitas perhubungan yang kurang responsif gender;
- 18) Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang masih menggunakan tenaga listrik akan mengakibatkan pemborosan anggaran pemerintah untuk membayar tagihan listrik;
- 19) Semakin meningkatnya jumlah pariwisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga akan membutuhkan jasa transportasi yang memadai;
- 20) Perlunya ketersediaan rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan;

- 21) Perlunya perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan yang responsif gender;
- 22) Perlunya revitalisasi terminal yang sudah ada;
- 23) Perlunya revitalisasi dermaga tersebar di Kukar;
- 24) Perlunya ketersediaan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kukar;
- 25) Perlu adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan skala Kabupaten;
- 26) Adanya kesamaan dalam upaya penanganan permasalahan Transportasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat;
- 27) Perlunya peningkatan pengelolaan perparkiran di kab.kukar;
- 28) Perlunya peningkatan akuntabilitas kinerja;
- 29) Perlunya peningkatan manajemen pengelolaan data bidang perhubungan;

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Beberapa factor yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya adalah:

- 1) Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Terbukanya peluang untuk menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan skala Kabupaten berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) perhubungan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

- 4) Adanya Kebutuhan pembangunan perhubungan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Kutai Kartanegara;
- 5) Adanya Kebutuhan pembangunan yang termuat dalam RPJPD dan RPJMD Kab.Kutai Kartanegara;
- 6) Telah tersedianya teknologi traffic light serta LPJU yang menggunakan tenaga surya (solar cell);
- 7) Adanya Kebutuhan pembangunan yang termuat dalam Tatralok Kab.Kutai Kartanegara;
- 8) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan pembangunan di bidang perhubungan;
- 9) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak akademisi atau perguruan tinggi yang ada di daerah guna meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan;
- 10) Telah tersedinya Akses transportasi jalan darat yang telah menghubungkan sebagian besar wilayah Kabupaten;
- 11) Tersedianya akses transportasi sungai;
- 12) Potensi PAD sector perhubungan yang masih bisa dioptimalkan;
- 13) Terbukanya kesempatan kerjasama dengan pihak swasta dalam bidang jasa transportasi, misalnya dalam hal penyediaan Taxi Kota;
- 14) Adanya penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun lembaga-lembaga pelatihan;
- 15) Ketersediaan alokasi dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN.

Tabel. 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Perhubungan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Tahun 2011-2015					Rasio Capaian pada Tahun 2011-2015				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	INDIKATOR KINERJA SASARAN RENSTRA 2011-2015																		
A	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas Aparatur Perhubungan yang semakin baik																		
1	Prosentase Aparatur Dinas Perhubungan yang memiliki kompetensi (Sertifikasi, Pelatihan, Bimtek)				37.9%	51.0%	56.9%	60.8%	65.4%	39.9%	52.9%	58.8%	62.7%	67.3%	105.3%	103.7%	103.3%	103.1%	102.9%
B	Sasaran 2: Terwujudnya pembangunan untuk peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang memadai																		
2	Prosentase Kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang layak				16.7%	22.2%	27.8%	33.3%	38.9%	16.7%	22.2%	27.8%	33.3%	38.9%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
3	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan				32.8%	45.3%	54.7%	64.1%	72.0%	32.8%	45.3%	54.7%	64.1%	72.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
C	Sasaran 3.1: Terlaksananya pelayanan prima kepada Pengguna jasa Transportasi sehingga tercipta budaya tertib lalu lintas yang aman, lancar dan terkendali																		
4	Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas				11.8%	21.6%	31.4%	41.2%	51.0%	-30.4%	-52.9%	-9.8%	28.4%	46.1%	-257.6%	-244.9%	-31.2%	68.9%	90.4%
5	Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji dan laik jalan				100.0%	100.0%	111.1%	122.2%	122.2%	104.7%	105.4%	117.3%	154.5%	160.3%	104.7%	105.4%	105.6%	126.4%	131.2%
D	Sasaran 3.2: Meningkatnya kinerja urusan Administrasi Umum, Kepegawaian, Ketatausahaan, Penyusunan Program dan Pengelolaan Keuangan																		

Tabel. 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Perhubungan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Tahun 2011-2015					Rasio Capaian pada Tahun 2011-2015				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Cakupan layanan urusan Administrasi Umum, Kepegawaian, Ketatausahaan, Penyusunan Program dan Pengelolaan Keuangan				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
E	Sasaran 3.3: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perhubungan																		
7	Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal)				101.0%	104.0%	106.8%	107.8%	166.5%	95.3%	99.5%	118.6%	157.4%	188.5%	94.3%	95.6%	111.0%	146.0%	113.2%
II	INDIKATOR KINERJA (PERMENDAGRI NO.54 TAHUN 2010)																		
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM (Fokus Layanan Urusan Wajib)																		
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum				79,528	95,213	123,900	134,434	145,000	79,528	95,213	123,900	134,434	145,000	1	1	1	1	1
2	Rasio ijin trayek				0.0019	0.0021	0.0021	0.0021	0.0022	0.0019	0.0021	0.0021	0.0021	0.0022	1	1	1	1	1
3	Jumlah uji kir angkutan umum				4,001	4,242	4,858	5,032	5,100	9,420	9,485	10,556	13,904	14,429	2	2	2	3	3
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Sungai/Udara/Terminal Bis				-	2	-	1	-	-	2	-	-	1					
5	Angkutan darat																		
6	Kepemilikan KIR angkutan umum																		
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)				+ 25 Menit	+ 25 Menit	+ 25 Menit	+ 25 Menit	+ 25 Menit	+ 25 Menit	+ 25 Menit	+ 25 Menit	+ 25 Menit	+ 25 Menit					
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum				Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000					
9	Pemasangan Rambu-rambu				400	500	650	850	400	500	650	850	1,000		1	1	1	1	-
B.	ASPEK DAYA SAING DAERAH (Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur)																		
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan																		
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum				79,528	95,213	123,900	134,434	145,000	79,528	95,213	123,900	134,434	145,000	1	1	1	1	1

Tabel. 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Perhubungan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Tahun 2011-2015					Rasio Capaian pada Tahun 2011-2015				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun				79,528	95,213	123,900	134,434	145,000	79,528	95,213	123,900	134,434	145,000	1	1	1	1	1
III	INDIKATOR KINERJA (RPJMD 2011-2015)																		
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum				79,528	95,213	123,900	134,434	145,000	79,528	95,213	123,900	134,434	145,000	1	1	1	1	1
2	Rasio ijin trayek				0.0019	0.0021	0.0021	0.0021	0.0022	0.0019	0.0021	0.0021	0.0021	0.0022	1	1	1	1	1
3	Jumlah uji kir angkutan umum				4,001	4,242	4,858	5,032	5,100	9,420	9,485	10,556	13,904	14,429	2	2	2	3	3
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis				-	2	-	1	-	-	2	-	-	1		1		-	
5	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)				+ 25 Menit	+ 25 Menit	+ 25 Menit	+ 25 Menit	+ 25 Menit	+ 25 Menit	+ 25 Menit	+ 25 Menit	+ 25 Menit	+ 25 Menit					
6	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum				Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000					
7	Pemasangan Rambu-rambu				400	500	650	850	400	500	650	850	1,000		1	1	1	1	-
IV	SPM PERHUBUNGAN																		
A.	Angkutan Jalan																		
1	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan																		
A.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	-	-											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60%	-	-											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan																		

Belum terdata/
perlu dilakukan inventarisasi pelayanan sesuai SPM

Tabel. 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Perhubungan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Tahun 2011-2015					Rasio Capaian pada Tahun 2011-2015				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
d	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Fasilitas Perlengkapan Jalan														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
e	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor																		
e	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Sumber Daya Manusia (SDM)																		
f	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
g	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
h	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	40%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Tabel. 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Perhubungan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Tahun 2011-2015					Rasio Capaian pada Tahun 2011-2015				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Keselamatan																		
	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
B.	Angkutan Sungai dan Danau.																		
1	Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau																		
	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	75%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	40%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau																		
	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	60%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Keselamatan														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Tabel. 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Perhubungan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Tahun 2011-2015					Rasio Capaian pada Tahun 2011-2015				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	100%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Sumber Daya Manusia (SDM)																		
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	50%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
C.	Angkutan Penyeberangan																		
1	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan																		
	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	60%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	100%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan																		

Tabel. 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Perhubungan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Tahun 2011-2015					Rasio Capaian pada Tahun 2011-2015				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	60%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Keselamatan																		
	Terpenuhi standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota	100%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Sumber Daya Manusia (SDM)																		
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	50%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
D.	Angkutan Laut																		
1	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut																		
	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	90%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Tabel. 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Perhubungan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Tahun 2011-2015					Rasio Capaian pada Tahun 2011-2015				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
v	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Jaringan Prasarana Angkutan Laut																		
w	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	60%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Keselamatan																		
x	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	100%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Sumber Daya Manusia (SDM)																		
x	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100%													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Belum terdata/
perlu dilakukan inventarisasi pelayanan sesuai SPM

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun 2011-2015					Realisasi Anggaran Pada Tahun 2011-2015					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2011-2015					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Langsung (BL): Belanja Pegawai, Belanja Barang/ Jasa, dan Belanja Modal	144,506,126,291	162,288,497,640	183,454,874,334	111,084,571,437	88,890,414,910	89,897,891,656	125,087,688,039	152,280,943,936	105,709,478,199	54,447,617,365	0.62	0.77	0.83	0.95	0.61	138,044,896,922	105,484,723,839
2	Belanja Tidak Langsung (BTL)	6,662,843,747	8,278,615,831	9,685,416,455	12,094,973,403	12,586,706,367	6,280,532,398	8,002,661,974	8,958,380,102	11,073,642,715	11,425,055,831	0.94	0.97	0.92	0.92	0.91	9,861,711,161	9,148,054,604
mlah Pagu dan Realisasi Anggar		151,168,970,038	170,567,113,471	193,140,290,789	123,179,544,840	101,477,121,277	96,178,424,054	133,090,350,013	161,239,324,038	116,783,120,914	65,872,673,196	1.56	1.74	1.76	1.87	1.52	147,906,608,083	114,632,778,443

Sumber: Laporan Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Beberapa permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

3.1.1. Pelayanan Angkutan Jalan

- 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
 - a) Masih belum tercapainya pelayanan sesuai dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - b) Belum adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara
 - c) Masih kurangnya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten
 - d) Minimnya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten
- 2) Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
 - a) Minimnya ketersediaan halte pada wilayah Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
 - b) Belum optimalnya fungsi Terminal angkutan umum yang ada
- 3) Fasilitas Perlengkapan Jalan
 - a) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten
 - b) Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang masih menggunakan tenaga listrik mengakibatkan pemborosan anggaran pemerintah untuk membayar tagihan listrik
- 4) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
 - a) Belum dibentuknya UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
- 5) Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Angkutan Jalan

- a) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal
- b) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor
- c) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir
- d) Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
- 6) Keselamatan Angkutan Jalan
 - a) Belum adanya pengawasan mengenai standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten.

3.1.2. **Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau.**

- 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau
 - a) Belum terdatanya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari
 - b) Belum terdatanya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari
- 2) Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau
 - a) Belum optimalnya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau
- 3) Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau
 - a) Belum termonitornya mengenai pemenuhan standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Angkutan Sungai dan Danau

- a) Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau

3.1.3. **Pelayanan Angkutan Penyeberangan**

- 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan
 - a) Belum termonitornya ketersediaan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten
 - b) Belum termonitornya ketersediaan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten
- 2) Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan
 - a) Belum Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran
- 3) Keselamatan Angkutan Penyeberangan
 - a) Belum termonitornya mengenai pemenuhan standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Angkutan Penyeberangan
 - a) Belum Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten.

3.1.4. **Pelayanan Angkutan Laut**

- 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Laut
 - a) Belum termonitornya mengenai ketersediaan kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan

- b) Belum termonitornya ketersediaan kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan
- 2) Jaringan Prasarana Angkutan Laut
 - a) Masih kurangnya ketersediaan dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
- 3) Keselamatan Angkutan Laut
 - a) Belum termonitornya mengenai pemenuhan standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1. VISI

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2016-2021, yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTAEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”.

3.2.2. MISI

Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
- 3) Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
- 4) Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
- 5) Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
- 6) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan;

- 7) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

3.2.3. Keterkaitan Tugas dan Fungsi SKPD terkait Visi dan Misi RPJMD

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2016-2021, maka keterkaitan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu “melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan” adalah dalam menunjang pelaksanaan misi ke 5, yaitu: Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah.

Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diarahkan untuk pelaksanaan Misi ke-5 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada RPJMD tahun 2016-2021, yaitu: Merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah, serta perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, laut, udara, sungai, danau dan penyebrangan, serta di bidang pengendalian dan operasional perhubungan.

Salah satu Program dan Kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2016-2021 yang diimplementasikan ke dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu: Program dan kebijakan dalam hal pembangunan dan pemerataan infrastruktur pelayanan publik, yang difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah, untuk pembangunan di bidang perhubungan mempunyai sasaran: “Meningkatnya Aksesibilitas Antar Wilayah Serta Kualitas Pelayanan Perhubungan”.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka strategi yang akan ditempuh adalah dengan “Revitalisasi Layanan Transportasi Publik”, dengan arah kebijakan:

- 1) Pengembangan jasa layanan transportasi kota yang menghubungkan ke sentra pertanian, kawasan khusus, destinasi pariwisata, dan outlet perdagangan;
- 2) Pengembangan layanan transportasi yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan khususnya yang berkaitan dengan transportasi public

Secara detail mengenai Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 untuk bidang perhubungan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Arah Kebijakan Kewilayahan RPJMD bidang Perhubungan:
Meningkatnya Aksesibilitas Antar Wilayah serta Kualitas Pelayanan Perhubungan

Tahun 1	Kec.	Tahun 2	Kec.	Tahun 3	Kec.	Tahun 4	Kec.	Tahun 5	Kec.
Pengembangan jasa layanan transportasi kota (dermaga)	Kelurahan Tuana Tuha Kecamatan Kenohan	Pengembangan jasa layamam transportasi kota (dermaga)	Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga	Pengembangan jasa layanan transportasi kota (dermaga)	Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa	Pengembangan jasa layanan transportasi kota ke sentra pertanian	Kecamatan Kota Bangun (lumbung padi), Muara Badak (ren. Dermaga), Loa Kulu dan Loa Janan (pengembangan bibit)	Pengembangan jasa layanan transportasi kota ke sentra pertanian	Kota Bangun (lumbung padi)
Pengembangan layanan transportasi kota	Wilayah Tengah	Pengembangan layanan transportasi kota	Wilayah Tengah	Pengembangan layanan transportasi kota	Wilayah Tengah dan Hilir	Pengembangan layanan transportasi kota	Wilayah Hilir dan Hulu	Pengembangan layanan transportasi kota	Wilayah Hulu
Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berhubungan dengan transportasi publik	Wilayah Tengah	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berhubungan dengan transportasi public	Wilayah Tengah	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berhubungan dengan transportasi publik	Wilayah Tengah dan Hilir	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berhubungan dengan transportasi publik	Wilayah Hilir dan Hulu	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berhubungan dengan transportasi publik	Wilayah Hulu

Sumber: Dokumen RPJMD Kab.Kukar 2016-2021 (diolah)

Kemudian factor-faktor Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

1) Faktor Penghambat

Factor-faktor Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mungkin dapat menghambat pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya adalah:

- a) Keterbatasan atau kurangnya ketersediaan alokasi dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN;
- b) Masih kurangnya kinerja penyusunan perencanaan program pembangunan di bidang perhubungan;
- c) Belum optimalnya penyusunan perencanaan program responsif gender bidang perhubungan;
- d) Masih banyaknya usulan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan yang belum atau tidak terakomodir dalam penetapan APBD, APBD Provinsi, dan APBN;
- e) Masih belum tercapainya pelayanan sesuai dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f) Belum optimalnya pengelolaan data bidang perhubungan;
- g) Masih kurang optimalnya koordinasi antar SKPD terkait;
- h) Belum adanya keterlibatan dari pihak swasta dalam bidang jasa transportasi, misalnya penyediaan Taxi;
- i) Belum dikembangkannya sistem lampu penerangan jalan umum (LPJU) dari tenaga listrik menjadi tenaga Surya (solar Cell);
- j) Belum adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- k) Kurangnya ketersediaan angkutan umum;
- l) Masih kurangnya ketersediaan prasarana angkutan jalan;
- m) Belum dibentuknya UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

2) Faktor Pendukung

Factor-faktor Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendorong tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya adalah:

- a) Kewenangan Dinas Perhubungan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Kewenangan Dinas Perhubungan berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c) Standar Pelayanan Minimal (SPM) perhubungan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan oleh Dinas Perhubungan;
- d) Tersedianya rencana pembangunan di bidang perhubungan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Kutai Kartanegara 2013-2031;
- e) Sudah tersedianya beberapa prasarana (Terminal, Pelabuhan, Dermaga, dan Dermaga Apung/ Ponton) dan fasilitas perhubungan di beberapa Kecamatan;
- f) Telah tersedianya beberapa fasilitas lalulintas jalan tersebar di wilayah Kab. Kukar;
- g) Sudah tersedianya beberapa fasilitas lalulintas sungai dan rambu laut tersebar di wilayah Kab. Kukar;
- h) Tersedianya Sistem Informasi atau Aplikasi untuk mengelola data dan informasi;
- i) Tersedianya Website Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyediakan informasi public;
- j) Adanya beberapa dokumen pendukung, berupa dokumen perencanaan, FS, DED, hasil kajian, hasil studi-studi yang telah disusun

3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian Perhubungan Periode 2015-2019

Sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek, yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Transportasi, meliputi:
 - a) Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
 - b) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.
- 2) Pelayanan Transportasi, meliputi:
 - a) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
 - b) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
 - c) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
 - d) Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;
 - e) Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
 - f) Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
 - g) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;
- 3) Kapasitas Transportasi, meliputi:
 - a) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
 - b) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
 - c) Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;

- d) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
- e) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

3.4. Telaahan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Periode 2013-2018

Sasaran pembangunan di bidang perhubungan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan dalam bertransportasi, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya pelayanan transportasi darat sesuai SPM
 - b) Menurunnya angka kecelakaan di jalan
- 2) Meningkatkan penyediaan infrastruktur bidang perhubungan secara merata dan berkualitas, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya kuantitas komoditas dan penumpang
- 3) Mempercepat pembukaan keterisolasian antar wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan transportasi, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Bertambahnya wilayah yang terlayani moda transportasi darat, udara dan SDP
- 4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perhubungan di Kalimantan Timur., dengan sasaran sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kualitas Aparat Perhubungan
 - b) Meningkatnya angka kelulusan Taruna SMK Pelayaran Kaltim yang bersertifikasi Pelaut
- 5) Meningkatkan kemampuan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan

- b) Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca yang bersumber dari sector transportasi.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013-2031, dikemukakan mengenai rencana pembangunan di bidang perhubungan, sebagai berikut:

1. Pengembangan jalur kereta api dengan tujuan memperlancar arus pergerakan penumpang dan barang di Kabupaten Kutai Kartanegara
 - a. Lokasi: Beberapa titik di Kabupaten Kutai Kartanegara
 - b. Pengaruh positif: Sebagai salah satu alternatif moda angkutan
 - c. Rekomendasi: Penyediaan studi kelayakan dalam proses pengembangan
2. Pengembangan Bandar Udara untuk membantu pengembangan akses kabupaten
 - a. Lokasi: Loa Kulu
 - b. Pengaruh Positif: Meningkatkan aksesibilitas menuju luar wilayah kabupaten Kutai Kartanegara melalui
 - c. Pengaruh Negatif: Rusaknya ekosistem sekitar wilayah bandara
 - d. Alternatif Mitigasi: Menjaga kelestarian ekosistem sekitarnya dengan melakukan delineasi terhadap kawasan
 - e. Rekomendasi: Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan
3. Rencana Jaringan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan
 Rencana jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara berupa peningkatan, optimalisasi, dan pembangunan terminal penumpang dan barang.
 Untuk terminal penumpang, rencana pengembangan yang akan dilakukan berupa:
 - a. pengembangan terminal penumpang Tipe A di Kecamatan Tenggarong;
 - b. optimalisasi terminal penumpang tipe C meliputi:

- 1) Terminal di Kecamatan Marang Kayu
 - 2) Terminal Tangga Arung berada di Kecamatan Tenggarong;
 - 3) Terminal Kota Bangun berada di Kecamatan Kota Bangun;
 - 4) Terminal Muara Jawa berada di Kecamatan Muara Jawa; dan
 - 5) Terminal Muara Badak berada di Kecamatan Muara Badak.
- c. pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi:
- 1) Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - 2) Kecamatan Loa Janan;
 - 3) Kecamatan Samboja;
 - 4) Kecamatan Muara Kaman;
 - 5) Kecamatan Anggana; dan
 - 6) Kecamatan Muara Badak.
- d. pembangunan terminal barang meliputi:
- 1) Kecamatan Samboja;
 - 2) Kecamatan Muara Jawa;
 - 3) Kecamatan Sanga– Sanga;
 - 4) Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - 5) Kecamatan Sebulu; dan
 - 6) Kecamatan Kota Bangun.
4. Rencana Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan
- Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan berupa peningkatan sarana dan prasarana angkutan baik angkutan penumpang maupun angkutan barang. Pada operasionalisasinya, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi : jaringan trayek angkutan dan sarana angkutan
- a. angkutan penumpang meliputi:
- 1) pengembangan sarana dan prasarana angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten berupa pelayanan trayek angkutan kota meliputi:
 - a) dalam Kota Tenggarong;
 - b) dalam Kecamatan Muara Badak;

- c) dalam Kecamatan Muara Jawa;
- d) Tenggarong – Kota Bangun;
- e) Loa Duri – Km. 42;
- f) Loa Janan Ulu – Samboja;
- g) Tenggarong – Loa Kulu;
- h) Tenggarong – Jahab;
- i) Tenggarong – Sebulu Seberang;
- j) Tenggarong – Pondok Labuh;
- k) Tenggarong – Jonggon; dan
- l) Tenggarong – Loa Tebu.

2) peningkatan sarana dan prasarana angkutan penumpang antar wilayah meliputi

- a) pelayanan trayek angkutan bus antar Kabupaten dalam provinsi (AKDP) armada bus berupa Samarinda – Kota Bangun
- b) pelayanan trayek angkutan bus antar Kabupaten dalam provinsi (AKDP) armada mobil penumpang umum meliputi
 - Samarinda – Tenggarong;
 - Samarinda – Sebulu;
 - Samarinda – Muara Kaman; dan
 - Samarinda – Muara Jawa

b. angkutan barang meliputi:

- 1) pengembangan sarana dan prasarana angkutan peti kemas
- 2) pengembangan pelayanan trayek angkutan barang peti kemas meliputi
 - a) Jalan Wolter Monginsidi – Jalan KH. Achmad Muchsin – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Diponogoro – Jalan Senopati – Jalan AM. Sangaji – Pelabuhan.
 - b) Jalan Wolter Monginsidi – Jalan KH. Achmad Muchsin – Jalan Imam Bonjol – Jalan Danau Aji – Kawasan Bisnis
- 3) pengembangan sarana dan prasarana angkutan barang non peti kemas; dan

4) pengembangan pelayanan trayek angkutan barang non peti kemas meliputi:

- a) Jalan Pahlawan – Bukit Biru – Jalan Pesut – Jalan Alimudin – Jalan Gn. Kombeng – Jalan Gn. Meratus – Jalan Danau Murung – Pasar Tangga Arung
- b) Jalan Pahlawan – Bukit Biru – Jalan Pesut – Jalan Alimudin – Jalan Gn. Kombeng – Jalan Gn. Belah – Jalan Long Bangun – Jalan Long Iram – Jalan Sukma – Jalan Pelabuhan; dan
- c) rencana jalan lingkar Kota Tenggarong

5. Rencana Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Rencana pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Kutai Kartanegara diwujudkan melalui pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk menunjang kegiatan penduduk terutama yang belum terjangkau oleh transportasi darat.

Rencana pengembangan sistem transportasi sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan prasarana pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan baik itu pelabuhan penumpang dan barang meliputi:

1) optimalisasi pelabuhan meliputi:

- a) Pelabuhan Muara Jawa atau Handil berada di Kecamatan Muara Jawa;
- b) Pelabuhan Meriam Anggana berada di Kecamatan Anggana;
- c) Pelabuhan Aji Imbut berada di Kecamatan Tenggarong Seberang;
- d) Pelabuhan Melayu atau Kumala berada di Kecamatan Tenggarong;
- e) Pelabuhan Sukmawira berada di Kecamatan Tenggarong;
- f) Pelabuhan Sebulu Moderen berada di Kecamatan Sebulu;
- g) Pelabuhan Muara Kaman berada di Kecamatan Muara Kaman;
- h) Pelabuhan Kota Bangun berada di Kecamatan Kota Bangun;
- i) Pelabuhan Muara Muntai berada di Kecamatan Muara Muntai;
- j) Pelabuhan Rimba Ayu berada di Kecamatan Kota Bangun;

- k) Pelabuhan Kembang Janggut berada di Kecamatan Kembang Janggut;
- l) Pelabuhan Tuana Tuha berada di Tuana Tuha;
- m) Pelabuhan Perjiwa berada di Kecamatan Tenggaraong;
- n) Pelabuhan Pasar Seni berada di Kecamatan Tenggaraong;
- o) Pelabuhan Muara Wis berada di Kecamatan Muara Wis;
- p) Pelabuhan Kenohan berada di Kecamatan Kenohan;
- q) Pelabuhan Muara Kembang berada di Kecamatan Muara Jawa; dan
- r) Pelabuhan Teluk Dalam berada di Teluk Dalam.

2) Rencana pembangunan pelabuhan meliputi:

- a) Pelabuhan Penyeberangan Sebulu berada di Kecamatan Sebulu;
- b) Pelabuhan Kayu Batu berada di Kecamatan Muara Wis;
- c) Pelabuhan Penyeberangan Muara Muntai berada di Kecamatan Muara Muntai;
- d) Pelabuhan Tabang berada di Kecamatan Tabang;
- e) Pelabuhan Sepatin berada di Kecamatan Anggana;
- f) Pelabuhan Desa Umaq Tukung, Dian, dan Ritan Baru berada di Kecamatan Tabang;
- g) Pelabuhan Penyeberangan Anggana – Sanga-Sanga;
- h) Pelabuhan Muara Aloh berada di Muara Aloh;
- i) Pelabuhan Desa Jantur berada di Desa Jantur;
- j) Pelabuhan Loa Lepu berada di Kecamatan Loa Kulu; dan
- k) Pelabuhan Alih Muat berada di Kecamatan Kota Bangun.

b. Pengembangan pelayanan trayek berupa pengembangan lintas Kabupaten meliputi:

- 1) Samarinda – Muara Muntai dan Panyinggahan;
- 2) Samarinda – Jantur, Tg. Jone;
- 3) Samarinda – Muara Lawa, Damai;
- 4) Samarinda – Melak, Long Iram;
- 5) Samarinda – Data Bilang, Long Bangun;
- 6) Samarinda – Kembang Janggung, Tabang;

- 7) Samarinda – Long Tesak;
 - 8) Samarinda – Muara Ancalong, Wahau;
 - 9) Tenggarong – Muara Kaman, Muara Siran;
 - 10) Tenggarong – Penyinggahan;
 - 11) Tenggarong – Pulau Kumala;
 - 12) Kota Bangun – Muara Muntai, Penyinggahan;
 - 13) Kota Bangun – Semayan, Melintang;
 - 14) Kota Bangun – Muara Wis;
 - 15) Kota Bangun – Kahala;
 - 16) Kota Bangun – Pela; dan
 - 17) Kota Bangun – Muara Siran.
6. Rencana Jaringan Perkeretaapian
- Kereta Api merupakan salah satu alternatif transportasi darat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana jaringan perkeretaapian di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari pengembangan prasarana kereta api dan pelayanan kereta api.
- a. Pengembangan prasarana kereta api meliputi:
 - 1) peningkatan stasiun kereta api meliputi:
 - a) Kecamatan Tenggarong berupa stasiun kereta api besar;
 - b) Kecamatan Kota Bangun berupa stasiun kereta api kecil;
 - 2) peningkatan jalur kereta api Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun;
 - 3) pembangunan jalur kereta api Tabang – Tutung; dan
 - 4) pengembangan jalur kereta api khusus pertambangan Kawasan Tabang-Kembang Janggut – Muara Kaman – Sebulu – Tenggarong – Samarinda – Pelabuhan Laut atau Muara Badak
 - b. Peningkatan pelayanan kereta api meliputi:
 - 1) peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
 - 2) jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.
7. Rencana Jaringan Transportasi Laut

Rencana pengembangan jaringan transportasi laut di Kabupaten Kutai Kartanegara pada daerah bagian Timur yang berbatasan dengan wilayah laut. Dalam pengembangan transportasi laut ini, dilakukan dengan pengembangan prasarana pelabuhan laut dan terminal khusus.

Untuk pengembangan prasarana laut dengan kegiatan optimalisasi pelabuhan laut meliputi:

- a. pelabuhan pengumpul Tanjung Santan berada di Kecamatan Marang Kayu;
- b. pelabuhan pengumpan Kuala Semboja berada di Kecamatan Samboja; dan
- c. pelabuhan umum meliputi:
 - 1) Pelabuhan Dondang berada di Kecamatan Muara Jawa;
 - 2) Pelabuhan Saliki berada di Kecamatan Muara Badak;
 - 3) Pelabuhan Tambora berada di Kecamatan Anggana; dan
 - 4) Pelabuhan Handil II berada di Kecamatan Samboja.

Sedangkan untuk kegiatan terminal khusus, dengan peningkatan dan optimalisasi terminal khusus sebanyak ± 32 unit dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) sebanyak ± 43 unit.

8. Rencana Jaringan Transportasi Udara

Pengembangan sistem transportasi udara di Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada pengembangan tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan. Pengembangan tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Kutai Kartanegara ini lebih ditekankan pada:

- a. pembangunan bandar udara perintis berada di Kecamatan Loa Kulu.
- b. peningkatan bandar udara pengumpan berada di Kecamatan Kota Bangun.
- c. pembangunan bandar udara perintis berada di Kecamatan Kembang Janggut; dan
- d. pengoptimalan bandar udara perintis yaitu Bandar Udara Marang Kayu, Bandar Udara Muara Badak, dan Bandar Udara Samboja.

Sedangkan pengembangan ruang udara untuk penerbangan adalah dengan penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang berada di Kecamatan Loa Kulu dan sekitarnya.

Pembatasan pengembangan wilayah lebih diutamakan pada daerah Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas serta daerah Permukaan Horizontal Dalam yang harus bebas terhadap halangan (*obstacles*) penerbangan.

9. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Program pemanfaatan ruang untuk bidang perhubungan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011-2031 dapat dilihat pada berikut:

Tabel 3.2
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG									
1	Jaringan Transportasi Darat								
k	Peningkatan terminal penumpang tipe C menjadi Tipe A	Terminal Timbau Kec. Tenggarong		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
l	Optimalisasi terminal penumpang tipe B	Kec. Marang Kayu		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
m	Optimalisasi terminal penumpang tipe C	- Terminal Tangga Arung - Terminal Kota Bangun - Terminal Muara Jawa - Terminal Muara Badak		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
n	Pembangunan terminal penumpang tipe C	- Kec. Tenggarong Seberang - Kec. Loa Janan - Kec. Samboja - Kec. Sebulu - Kec. Muara Kaman - Kec. Loa Kulu - Kec. Anggana - Kec. Muara Badak		Dinas PU Dishub LLAJ	APBN APBD Swasta				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
o	Pembangunan terminal barang	- Kec. Samboja - Kec. Muara Jawa - Kec. Sanga-Sanga - Kec. Tenggaraong Seberang - Kec. Sebulu - Kec. Loa Kulu - Kecamatan Kota Bangun		Dinas PU Dishub LLAJ	APBN APBD Swasta				
p	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan penumpang	- Dalam Kota - Antar kabupaten dalam prov.		Dinas PU Dishub LLAJ	APBN APBD Swasta				
q	Pengembangan sarana dan prasarana angkutan peti kemas	- Dalam Kota - Antar kabupaten dalam prov.		Dinas PU Dishub LLAJ	APBN APBD Swasta				
r	Optimalisasi pelabuhan	Tersebar		Dishub	APBN APBD Swasta				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
s	Pembangunan pelabuhan baru	Tersebar		Dishub	APBN APBD Swasta				
t	Pengembangan trayek	Tersebar		Dishub	APBN APBD Swasta				
2	Jaringan Perkeretaapian								
a	Peningkatan pembangunan jaringan kereta api	Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun		Dishub PT. KAI	APBN APBD				
		Tabang – Tutung		Dishub PT. KAI	APBN APBD				
b	Pengembangan jalur khusus pertambangan	pengembangan jalur kereta api khusus pertambangan Kawasan		Dishub	Swasta				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
		Tabang-Kembang Janggut - Muara Kaman – Sebulu - Tenggarong – Samarinda – Pelabuhan Laut atau Muara Badak (Samboja/Marangkayu).		PT. KAI					
c	Pembangunan stasiun kereta api	- Kec.Tenggarong - Kec.Kota Bangun - Kec.Marang Kayu - Kec.Tabang - Kec.Kembang Janggut - Kec.Samboja - Kec.Muara Jawa - Kec.Sanga-Sanga - Kec.Muara Badak		Dishub PT. KAI	APBN APBD				
3	Jaringan Transportasi Laut								
a	Pengembangan dan peningkatan pelabuhan laut	Pel.Pengumpul: - Tanjung Santan - Kuala Semboja Pel Pengumpan: - Pelabuhan Dondang		Dishub Pelindo	APBN APBD				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
		- Pelabuhan Saliki - Pelabuhan Tambora - Pelabuhan Handil II							
b	Pengembangan terminal khusus 32 unit	Tersebar		Dishub	APBN				
c	Pengembangan terminal untuk kepentingan sendiri 43 unit	Tersebar		Swasta	Swasta				
4	Jaringan Transportasi Udara								
a	Pembangunan bandar udara pengumpul skala sekunder	Kec. Loa Kulu		Dishub PT. Angkasapura	APBN APBD				
b	Pembangunan bandar udara pengumpan	Kec.Kota Bangun		Dishub PT. Angkasapura	APBN APBD				
c	Pembangunan bandar udara perintis	Kec. Kembang Janggut							
d	Penetapan KKOP	Kec. Loa Kulu		Dishub PT.Angkasapura	APBN APBD				

Sumber: RTRW Kab.Kutai Kartanegara

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Renstra Dinas Perhubungan
Kab. Kutai Kartanegara 2016-2021

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang akan ditangani dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, yaitu:

- 1) Percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara juga perlu ditunjang dengan ketersediaan infrastruktur di bidang perhubungan yang baik;
- 2) Perlu ada pengembangan jasa transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sampai sekarang sepi peminatnya;
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mentaati peraturan lalu lintas jalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan;
- 4) Jumlah trayek dan angkutan umum yang masih kurang di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 5) Belum adanya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama dalam pengadaan sarana transportasi, misalnya: belum adanya Taxi, sehingga para Wisatawan yang datang ke Kabupaten Kutai Kartanegara sering mengalami kesulitan dalam hal sarana transportasi yang memadai;
- 6) Perlu tersedianya sarana transportasi umum yang biaya terjangkau, aman dan nyaman serta menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 7) Perlunya dukungan untuk terwujudnya pembangunan Bandara Kabupaten Kutai Kartanegara baik khusus maupun bandara umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8) Pentingnya responsif gender dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan;

- 9) Perlu ditingkatkannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara dari sektor perhubungan, yaitu melalui peningkatan retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi parkir, retribusi tambat kapal, retribusi terminal, dan retribusi lainnya di bibiang perhubungan;
- 10) Perlu ditingkatkannya aplikasi teknologi informasi guna mendukung manajemen transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 11) Diperlukan peningkatan kapasitas SDM perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) Belum optimalnya system perencanaan guna memenuhi kebutuhan pembangunan di bidang perhubungan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 13) Perlunya peningkatan kinerja penyusunan perencanaan program dalam pengusulan program dan kegiatan pada APBD, APBD Provinsi serta APBN bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
- 14) Diperlukan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kabupaten guna ketepatan dalam proses penyediaan fasilitas lalu lintas yang sesuai kebutuhan;
- 15) Perlunya penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 16) Belum optimalnya fungsi Terminal dan pelayanan angkutan jalan guna menekan penggunaan kendaraan pribadi;
- 17) Perlunya dilakukan pemberdayaan kepada para pengusaha atau penyedia jasa angkutan umum untuk meningkatkan kapasitas angkutan umum dan mencegah berkurangnya angkutan umum;
- 18) Lemahnya kinerja manajemen pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi di bidang perhubungan yang akurat guna terpenuhinya

kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;

- 19) Menjaga akuntabilitas kinerja guna menghindari temuan hasil pemeriksaan;
- 20) Pemberian pelayanan masyarakat sesuai SPM agar meningkatkan kepuasan masyarakat;
- 21) Perlunya peningkatan pemahaman Aparatur tentang tugas pokok dan fungsi dan pembagian tugas yang jelas;
- 22) Perlunya sosialisasi keselamatan dan meningkatkan ketersediaan fasilitas lalu lintas guna membangun kesadaran masyarakat untuk pentingnya mentaati peraturan lalu lintas;
- 23) Pengoptimalan fungsi layanan pengujian kendaraan bermotor agar semakin terpenuhinya angkutan umum/ darat yang layak jalan dan ramah lingkungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk menangani isu-isu strategis yang telah ditentukan tersebut akan dirumuskan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1: Menyediakan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Guna Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah
- 2) Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah yang hendak dicapai dari tujuan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran dari Tujuan 1: Menyediakan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Guna Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah; dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai;
 - b) Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas.
- 2) Sasaran dari Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan; dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan
 - b) Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji
 - c) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - d) Nilai evaluasi LKjIP;
 - e) Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Sasaran-Sasaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sasaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1	Menyediakan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Guna Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah	1) Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai	1) Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai 2) Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan	2) Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1) Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan 2) Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 4) Nilai evaluasi LKjIP 5) Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Formulasi	Kondisi Awal (s/d 2015)	RENCANA TARGET KINERJA PROGRAM (5 TAHUN)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
						Target	Target	Target	Target	Target	Target
1		2		3	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 1											
1	Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai	1	Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	Jumlah (komulatif) prasarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia dan memadai dibagi jumlah prasarana dan fasilitas yang seharusnya tersedia dan memadai dikali 100%	54%	58%	77%	80%	83%	91%	93%
		2	Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	Jumlah Faslalin yg tersedia dan memadai dibagi jumlah Faslalin yang seharusnya tersedia dan memadai dikali 100%	13%	15%	31%	57%	79%	92%	100%
SASARAN 2											
1	Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1	Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan	Jumlah (komulatif) layanan sesuai SPM yang sudah dipenuhi dibagi jumlah seluruh layanan sesuai SPM yang seharusnya dipenuhi dikali 100%	0.0	19%	38%	58%	77%	100%	100%

	2	Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji	Jumlah (pertahun) kendaraan yang diuji (lulus uji) dibagi jumlah kendaraan wajib uji dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai (pertahun) hasil survey dan perhitungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan	0 (Belum diukur)	70 (Baik)	75 (Baik)	80 (Sangat Baik)	83 (Sangat Baik)	85 (Sangat Baik)	87 (Sangat Baik)
	4	Nilai evaluasi LKjIP	Hasil penilaian (pertahun) oleh Inspektorat Kab. Kukar	75,15 (BB)	70 (B)	75 (BB)	77 (BB)	81 (A)	83 (A)	90 (AA)
	5	Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan	Jumlah (pertahun) pendapatan retribusi dibagi jumlah target pendapatan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

4.3.1. Perumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Guna mencapai sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Renstra tahun 2016-2021, maka dirumuskan strategi pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rumusan Strategi Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Strategi	
1	2	3		4	
1	Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai	1	Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	1	Revitalisasi Layanan Transportasi Publik (sesuai strategi dalam RPJMD Kukar 2016-2021)
				2	Tingkatkan ketersediaan prasarana: angkutan jalan, sungai dan danau, penyebrangan, dan angkutan laut guna memenuhi standar pelayanan sesuai SPM Perhubungan
				3	Perkuat sistem perencanaan program kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, SPM, serta dokumen perencanaan daerah yang mendasari penyelenggaraan pembangunan di bidang perhubungan agar lebih mendasari dan memberikan kejelasan dalam pengusulan program dan kegiatan pada APBD, APBD Provinsi serta APBN bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
				4	Optimalkan sistem perencanaan guna memenuhi kebutuhan pembangunan di bidang perhubungan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
				5	Manfaatkan dokumen perencanaan, FS, DED, hasil kajian, hasil studi-studi yang telah disusun sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan serta fasilitas lalu lintas jalan maupun sungai dan laut
				6	Optimalkan sistem perencanaan pembangunan dengan memperhatikan Permendagri 67 th.2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender daerah agar tersedia prasarana dan fasilitas perhubungan yang responsif gender
				7	Manfaatkan Dukungan Instansi-Instansi Terkait guna mendukung kelancaran perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di bidang perhubungan
				8	Optimalkan fungsi prasarana dan fasilitas perhubungan yang sudah ada di beberapa Kecamatan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang memadai

				9	Optimalkan fungsi Terminal dan pelayanan angkutan jalan guna menekan penggunaan kendaraan pribadi
				10	Manfaatkan kewenangan berdasarkan peraturan serta Tugas dan Fungsi untuk melakukan revitalisasi Terminal dan Dermaga yang sudah ada
		-	-	-	-
		2	Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	1	Lakukan penyusunan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kabupaten guna ketepatan dalam proses penyediaan fasilitas lalu lintas yang sesuai kebutuhan
				2	Manfaatkan fasilitas lalu lintas yang sudah ada guna kelancaran akses transportasi di semua wilayah Kabupaten serta mendukung perkembangan sektor pariwisata
				3	Menyediakan fasilitas lalu lintas untuk seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan
				4	Perlunya pengembangan sistem LPJU dan Traffic Light dengan menggunakan tenaga surya (solar cell) agar lebih efektif dan efisiensi belanja daerah karena tidak perlu lagi membayar tagihan listrik
-	-				
2	Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1	Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan	1	Upayakan peningkatan kualitas pelayanan perhubungan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) Perhubungan
				2	Lakukan studi atau kajian mengenai Penerapan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bekerja sama dengan pihak swasta maupun pihak akademisi atau perguruan tinggi di daerah
				3	Tingkatkan pelayanan: angkutan jalan, sungai dan danau, penyebrangan, dan angkutan laut sesuai guna memenuhi standar pelayanan sesuai SPM Perhubungan
				4	Lakukan Manajemen SDM guna terpenuhinya Aparatur Perhubungan yang memiliki kompetensi guna memenuhi standar pelayanan sesuai SPM Perhubungan
				5	Libatkan perananan pihak swasta dalam hal penyediaan jasa transportasi (tersedianya Taxi) guna menunjang perkembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara
				6	Upayakan pemberdayaan kepada para pengusaha atau penyedia jasa angkutan umum untuk meningkatkan kapasitas angkutan umum dan mencegah berkurangnya angkutan umum
		2	Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji	1	Optimalkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor guna meningkatkan kelayakan angkutan umum darat yang akan berdampak untuk meminimalisir kejadian kecelakaan serta mencegah pencemaran udara yang disebabkan asap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih

			2	Optimalkan koordinasi dengan Instansi Terkait terutama dengan pihak Kepolisian guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas	
			3	Tingkatkan sosialisasi keselamatan dan tingkatkan ketersediaan fasilitas lalu lintas guna membangun kesadaran masyarakat untuk pentingnya mentaati peraturan lalu lintas	
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	Tingkatkan kinerja manajemen pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi di bidang perhubungan yang akurat guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan
				2	Adakan kerjasama dengan pihak Akademisi atau Perguruan Tinggi di Daerah guna meningkatkan kinerja pengelolaan data dan informasi
				3	Optimalkan pemanfaatan Sistem Informasi atau Aplikasi serta Website Dinas Perhubungan untuk memanajemen pengelolaan data dan informasi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat maupun Instansi terkait
				4	Optimalkan pemanfaatan Sistem Informasi dan Website Dinas Perhubungan guna mendukung perwujudan akuntabilitas kinerja
				5	Adakan kerjasama dengan pihak Akademisi atau Perguruan Tinggi di daerah untuk mengoptimalkan penyusunan dan penerapan SOP Dinas Perhubungan
		4	Nilai evaluasi LKjIP	1	Adakan kerjasama dengan pihak Akademisi atau Perguruan Tinggi di Daerah guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan
				2	Adakan kerjasama dengan pihak Akademisi atau Perguruan Tinggi di daerah untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan
				3	Diperlukan koordinasi dan konsultasi antar Intansi terkait baik dengan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat guna meningkatkan kinerja perencanaan peningkatan akuntabilitas kinerja
		5	Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan	1	Perlu dibentuknya UPT PKB, UPT Terminal, UPT Dermaga, dan UPT Pelabuhan guna peningkatan pelayanan dan upaya peningkatan PAD dari sektor penerimaan retribusi bidang perhubungan
				2	Tingkatkan sistem pengelolaan perparkiran dan pelayanan perhubungan lainnya (PKB, dll) yang mempunyai potensi PAD dalam upaya meningkatkan penerimaan retriburi dari sektor perhubungan

4.3.2. Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk melaksanakan strategi yang telah ditentukan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Renstra tahun 2016-2021, maka dirumuskan kebijakan-kebijakan dari masing-masing tujuan, sasaran, dan strategi pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi		Kebijakan	
2	3	4		5	
Menyediakan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Guna Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah	1 Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai	1	Revitalisasi Layanan Transportasi Publik (sesuai strategi dalam RPJMD Kukar 2016-2021)	1	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan khususnya yang berkaitan dengan transportasi public (sesuai kebijakan dalam RPJMD Kukar 2016-2021)
				2	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan di seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan
		2	Tingkatkan ketersediaan prasarana: angkutan jalan, sungai dan danau, penyebrangan, dan angkutan laut guna memenuhi standar pelayanan sesuai SPM Perhubungan	3	Mengupayakan ketersediaan prasarana: angkutan jalan, sungai dan danau, penyebrangan, dan angkutan laut sesuai SPM Perhubungan
		3	Perkuat sistem perencanaan program kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, SPM, serta dokumen perencanaan daerah yang mendasari penyelenggaraan pembangunan di bidang perhubungan agar lebih mendasari dan memberikan kejelasan dalam pengusulan program dan kegiatan pada APBD, APBD Provinsi serta APBN bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	4	Menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas, dengan memuat seluruh rencana kebutuhan pembangunan di bidang perhubungan untuk seluruh Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 18 Kecamatan
		4	Manfaatkan dokumen perencanaan, FS, DED, hasil kajian, hasil studi-studi yang telah disusun sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan serta fasilitas lalu lintas jalan maupun sungai dan laut	5	Melanjutkan tahapan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan, FS, DED, hasil kajian, hasil studi-studi yang telah disusun dengan memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat

			5	Optimalkan sistem perencanaan pembangunan dengan memperhatikan Permendagri 67 th.2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender daerah agar tersedia prasarana dan fasilitas perhubungan yang responsif gender	6	Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan bidang perhubungan yang responsif gender dengan berpedoman pada Permendagri 67 th.2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender daerah
					7	Melibatkan pihak Akademisi pada Perguruan Tinggi di Daerah dalam proses pelaksanaan pengarusutamaan gender daerah di bidang perhubungan
			6	Manfaatkan Dukungan Instansi-Instansi Terkait guna mendukung kelancaran perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di bidang perhubungan	8	Melakukan koordinasi baik antar daerah maupun dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan
			7	Optimalkan fungsi prasarana dan fasilitas perhubungan yang sudah ada di beberapa Kecamatan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang memadai	9	Optimalisasi fungsi prasarana dan fasilitas perhubungan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan
			8	Optimalkan fungsi Terminal dan pelayanan angkutan jalan guna menekan penggunaan kendaraan pribadi	10	Memelihara prasarana dan fasilitas perhubungan yang ada diseluruh wilayah Kabupaten secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan
			9	Manfaatkan kewenangan berdasarkan peraturan serta Tugas dan Fungsi untuk melakukan revitalisasi Terminal dan Dermaga yang sudah ada	11	Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang sudah ada di wilayah Kabupaten
					12	Revitalisasi Terminal, Dermaga, Pelabuhan
			10	Lakukan penyusunan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kabupaten guna ketepatan dalam proses penyediaan fasilitas lalu lintas yang sesuai kebutuhan	13	Membuat Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan UU 22 th.2009 dan PP79 th.2013 tentang Jaringan LLAJ
					14	Menyusun rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas Darat, Sungai, Danau dan Penyebrangan, dan Laut mencakup seluruh wilayah dalam Kabupaten
			11	Manfaatkan fasilitas lalu lintas yang sudah ada guna kelancaran akses transportasi di semua wilayah Kabupaten serta mendukung perkembangan sektor	15	Melakukan inventarisasi terhadap ketersediaan fasilitas lalu lintas Darat, Sungai, Danau dan Penyebrangan, dan Laut di seluruh wilayah Kabupaten

				pariwisata	16	Perawatan atau pemeliharaan fasilitas lalu lintas Darat, Sungai, Danau dan Penyebrangan, dan Laut yang ada diseluruh wilayah Kabupaten secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan
			12	Menyediakan fasilitas lalu lintas untuk seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan	17	Menyediakan fasilitas lalu lintas Darat, Sungai, Danau dan Penyebrangan, dan Laut diseluruh wilayah Kabupaten secara bertahap sesuai dengan kebutuhan
					18	Menyediakan LPJU dan Traffic Light/ Warning Light diseluruh wilayah Kabupaten secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan
			13	Perlunya pengembangan sistem LPJU dan Traffic Light dengan menggunakan tenaga surya (solar cell) agar lebih efektif dan efisiensi belanja daerah karena tidak perlu lagi membayar tagihan listrik	19	Mengembangkan LPJU dan Traffic Light yang masih menggunakan tenaga listrik untuk beralih ke tenaga surya (solar cell) diseluruh wilayah Kabupaten secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan
-	-	-				
-	-	-				
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan	2	Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1	Upayakan peningkatan kualitas pelayanan perhubungan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) Perhubungan	1	Penerapan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan secara bertahap dan sesuai kebutuhan
			2	Lakukan studi atau kajian mengenai Penerapan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bekerja sama dengan pihak swasta maupun pihak akademisi atau perguruan tinggi di daerah	2	Melakukan studi atau kajian mengenai Penerapan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan di Kabupaten Kutai Kartanegara
					3	Melakukan inventarisasi kegiatan pelayanan berdasarkan SPM
			3	Tingkatkan pelayanan: angkutan jalan, sungai dan danau, penyebrangan, dan angkutan laut sesuai guna memenuhi standar pelayanan sesuai SPM Perhubungan	4	Mengupayakan penyediaan layanan angkutan jalan, sungai dan danau, penyebrangan, dan angkutan laut sesuai SPM Perhubungan
					5	1) Pengembangan jasa layanan transportasi kota yang menghubungkan ke sentra pertanian, kawasan khusus, destinasi pariwisata, dan outlet perdagangan (sesuai kebijakan dalam RPJMD Kukar 2016-2021)

				6	2) Pengembangan layanan transportasi yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (sesuai kebijakan dalam RPJMD Kukar 2016-2021)
		4	Lakukan Manajemen SDM guna terpenuhinya Aparatur Perhubungan yang memiliki kompetensi guna memenuhi standar pelayanan sesuai SPM Perhubungan	7	Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Perhubungan sesuai SPM Perhubungan
				8	Mengusulkan kepada BKD untuk memberikan Diklat Teknis Perhubungan kepada Aparatur Dinas Perhubungan
				9	Mengusulkan anggaran Diklat pada APBD
				10	Bekerjasama dengan Lembaga Diklat Perhubungan
		5	Libatkan perananan pihak swasta dalam hal penyediaan jasa transportasi (tersedianya Taxi) guna menunjang perkembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara	11	Bekerjasama dengan pihak Swasta dalam hal penyediaan sarana transportasi
		6	Upayakan pemberdayaan kepada para pengusaha atau penyedia jasa angkutan umum untuk meningkatkan kapasitas angkutan umum dan mencegah berkurangnya angkutan umum	12	Melakukan kegiatan pemberdayaan kepada para pengusaha/ penyedia jasa transportasi
				13	Mengevaluasi pelaksanaan tarif angkutan
				14	Pemberdayaan penyelenggara jasa angkutan umum melalui pemberian Subsidi Angkutan Umum
		7	Optimalkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor guna meningkatkan kelayakan angkutan umum darat yang akan berdampak untuk meminimalisir kejadian kecelakaan serta mencegah pencemaran udara yang disebabkan asap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	15	Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai SPM Perhubungan
				16	Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang berkualitas
		8	Optimalkan koordinasi dengan Instansi Terkait terutama dengan pihak Kepolisian guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas	17	Bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam hal peningkatan keselamatan lalu lintas
		9	Tingkatkan sosialisasi keselamatan dan tingkatkan ketersediaan fasilitas lalu lintas guna membangun kesadaran masyarakat untuk pentingnya mentaati peraturan lalu lintas	18	Mengadakan sosialisasi keselamatan lalu lintas

		10	Tingkatkan kinerja manajemen pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi di bidang perhubungan yang akurat guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan	19	Pemberdayaan ASN dan Tenaga Pendukung Non PNS Dinas Perhubungan untuk peningkatan pengelolaan data bidang perhubungan
				20	Melakukan koordinasi secara rutin antara atasan dan bawahan guna menjamin kelancaran pelaksanaan program kerja
		11	Adakan kerjasama dengan pihak Akademisi atau Perguruan Tinggi di Daerah guna meningkatkan kinerja pengelolaan data dan informasi	21	Bekerjasama dengan pihak Akademisi pada Perguruan Tinggi di Daerah dalam hal manajemen pengelolaan data dan informasi
		12	Optimalkan pemanfaatan Sistem Informasi atau Aplikasi serta Website Dinas Perhubungan untuk memanajemen pengelolaan data dan informasi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat maupun Instansi terkait	22	Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi/ aplikasi serta Website Dinas Perhubungan
		13	Optimalkan pemanfaatan Sistem Informasi dan Website Dinas Perhubungan guna mendukung perwujudan akuntabilitas kinerja	23	Mengembangkan sistem informasi dan website Dinas Perhubungan
		14	Adakan kerjasama dengan pihak Akademisi atau Perguruan Tinggi di daerah untuk mengoptimalkan penyusunan dan penerapan SOP Dinas Perhubungan	24	Bekerjasama dengan pihak Akademisi pada Perguruan Tinggi di Daerah dalam penyusunan dan penerapan SOP
		15	Adakan kerjasama dengan pihak Akademisi atau Perguruan Tinggi di Daerah guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan	25	Bekerjasama dengan pihak Akademisi pada Perguruan Tinggi di Daerah dalam proses penyusunan rencana program kerja jangka menengah maupun jangka pendek (tahunan)
		16	Adakan kerjasama dengan pihak Akademisi atau Perguruan Tinggi di daerah untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	26	Bekerjasama dengan pihak Akademisi pada Perguruan Tinggi di Daerah dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
		17	Diperlukan koordinasi dan konsultasi antar Instansi terkait baik dengan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat guna meningkatkan kinerja perencanaan peningkatan akuntabilitas kinerja	27	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait baik di dalam daerah maupun di luar daerah sesuai dengan tingkat kebutuhan

			18	Perlu dibentuknya UPT PKB, UPT Terminal, UPT Dermaga, dan UPT Pelabuhan guna peningkatan pelayanan dan upaya peningkatan PAD dari sektor penerimaan retribusi bidang perhubungan	28	Mengusulkan pembentukan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, serta UPT lainnya apabila memang diperlukan
			19	Tingkatkan sistem pengelolaan perpajakan dan pelayanan perhubungan lainnya yang mempunyai potensi PAD dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi dari sektor perhubungan	29	Peningkatan pengawasan dan pengelolaan perpajakan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
					30	Melakukan inventarisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Perhubungan
					31	Bekerjasama dengan pihak Akademisi pada Perguruan Tinggi di Daerah untuk melakukan kajian peningkatan retribusi sektor perhubungan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk Urusan Wajib Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, secara umum dapat dijabarkan ke dalam berbagai Program dan Kegiatan, sebagai berikut:

- 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**
 - 1) Pembangunan Terminal;
 - 2) Pembangunan Halte;
 - 3) Pembangunan Pelabuhan Laut;
 - 4) Pembangunan Dermaga/ Pelabuhan Sungai;
 - 5) Pembangunan Dermaga Apung/ Ponton;
 - 6) *dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan perhubungan.*
- 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;**
 - 1) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal;
 - 2) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte;
 - 3) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pelabuhan Laut;
 - 4) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga/ Pelabuhan Sungai;
 - 5) Pemeliharaan Dermaga Apung/ Ponton;
 - 6) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (Rambu-Rambu Jalan);
 - 7) Pemeliharaan LPJU;
 - 8) Pemeliharaan Traffic/ Warning Light;
 - 9) Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan;
 - 10) Pemeliharaan Marka Jalan;
 - 11) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Sungai, Danau dan penyebrangan (Rambu-Rambu Sungai);
 - 12) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rambu Laut/ Mercusuar/ Rambu Suar Laut;
 - 13) Perawatan dan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 14) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 15) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor/ Tempat Kerja;
 - 16) *dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan perhubungan.*
- 3. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;**
 - 1) Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas (Rambu-Rambu Jalan);
 - 2) Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);
 - 3) Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dari tenaga listrik beralih ke tenaga surya;
 - 4) Pengadaan Traffic/ Warning Light;

- 5) Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail);
- 6) Pengecatan Marka Jalan;
- 7) Pengadaan Paku Marka Jalan;
- 8) Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyebrangan (Rambu-Rambu Sungai);
- 9) Pengadaan Rambu Laut/ Mercusuar/ Rambu Suar Laut;
- 10) Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas Bidang Perhubungan;
- 11) Pengerukan Alur Pelayaran Sungai dan Danau;
- 12) Pemeriksaan dan Uji Konstruksi Kapal;
- 13) Normalisasi Alur Sungai;
- 14) Monitoring ,pendataan dan inventarisir fasilitas lalu lintas di Kab. Kutai Kartanegara;
- 15) Sosialisasi keselamatan lalu lintas;
- 16) Pengaturan dan Penataan Arus Lalu Lintas dan parkir dalam rangka hari-hari besar, pekan daerah dan hari-hari tertentu lainnya di kab. Kuka;
- 17) Sosialisasi/penyuluhan Kebijakan di bidang Perhubungan Darat;
- 18) Sosialisasi Keselamatan LLASDP;
- 19) *dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan perhubungan.*

4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

- 1) Studi/ kajian Penerapan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2) Inventarisasi kegiatan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan;
- 3) Pemberdayaan penyelenggara jasa transportasi;
- 4) Manajemen pengelolaan data dan informasi bidang perhubungan
- 5) Pengembangan/ Pemeliharaan sistem informasi/ aplikasi serta Website Dinas Perhubungan;
- 6) Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan;
- 7) Study Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab.Kukar;
- 8) Pendataan Bandara Khusus dan Tempat Pendaratan Helicopter di Wilayah Kab.Kukar;
- 9) Kajian Akademis Penyusunan Raperda Pembentukan Bidang dan UPT;
- 10) Penunjang Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN)
- 11) Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan;
- 12) Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan;
- 13) *dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan perhubungan.*

5. Program Peningkatan Kelayakan Pengoprasian Kendaraan Bermotor;

- 1) Sosialisasi dan razia/ pemeriksaan kendaraan wajib uji;
- 2) Pengadaan material PKB, Parkir Kendaraan bermotor dan retribusi tambat kapal;
- 3) Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor;

- 4) Pembuatan/ Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB);
- 5) *dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan perhubungan.*

Berbagai Program dan Kegiatan setiap SKPD (Program Kegiatan Rutin) yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 11) Penyediaan bahan logistik kantor;
- 12) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- 14) Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran;
- 15) Penyediaan Jasa Publikasi dan Informasi;
- 16) Penataan Kearsipan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional;
- 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor/ Tempat Kerja;
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 6) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/ tempat kerja;
- 7) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional;
- 8) Pembangunan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

- 1) Pengadaan Mesin Absensi;
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
- 3) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
- 4) Pengadaan Pakaian Khusus di Hari-Hari Tertentu;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal;

- 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- 3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

- 1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- 2) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan;
- 3) Monitoring dan Evaluasi Aset;
- 4) Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 5) Penyusunan Renstra;
- 6) Penyusunan Renja;
- 7) Penyusunan LKjIP;
- 8) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 9) Kajian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- 10) Manajemen Reformasi Birokrasi;
- 11) Kajian Inovasi Pelayanan Publik;
- 12) Pembuatan Profil Dinas;
- 13) Penyusunan Dokumen Pelaporan Lainnya.

5.2. Indikator Kinerja

Sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan Program, maka ditentukan indikator-indikator kinerja program pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan

Program		Indikator Kinerja	
1	1)Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dan	1	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis (Indikator RPJMD)
	2)Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2	Prosentase Cakupan sarana dan prasarana perhubungan (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung)
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	3	Prosentase Jumlah Prasarana (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan

		4	Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (Traffic/ Warning Light, Rambu Lalin, Pagar Pengaman Jalan, dan Marka Jalan) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan
		5	Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (LPJU) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan
		6	Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (Rambu Sungai dan Laut) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan
		7	Prosentase Jumlah Alat Uji Kendaraan yang dilakukan Kalibrasi dan Perawatan
		8	Prosentase Jumlah Prasarana (Gedung Kantor/ Tempat Kerja/Rumah Dinas) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	9	Jumlah arus penumpang angkutan umum (<i>Indikator RPJMD</i>)
		10	Cakupan pelayanan angkutan sesuai SPM
		11	Rasio Ijin Trayek (<i>Indikator RPJMD</i>)
4	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	12	Kelengkapan rambu-rambu lalu lintas menuju obyek wisata (sesuai RIPDA) (<i>Indikator RPJMD</i>)
		13	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (menuju Bandara) (<i>Indikator RPJMD</i>)
		14	Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (Rambu Lalu Lintas, Traffic/Warning Light, Pagar Pengaman Jalan, Marka Jalan)
		15	Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LPJU)
		16	Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu

			Lintas Sungai dan Laut (Rambu Sungai dan Laut)
5	Program Peningkatan Kelayakan Pengoprasian Kendaraan Bermotor	17	Prosentase jumlah kendaraan yang di uji terhadap jumlah kendaraan wajib diuji
		18	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (<i>Indikator RPJMD</i>)
		19	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rata-Rata) (<i>Indikator RPJMD</i>)
		20	Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (<i>PKB, Parkir, Tambat Kapal, dll</i>)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	21	Cakupan layanan administrasi perkantoran
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	22	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur
3	Program peningkatan disiplin aparatur	23	Tingkat kepatuhan aparatur
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	24	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.3. Kelompok Sasaran

Perencanaan Program dan Kegiatan adalah guna tercapainya masing-masing sasaran dari setiap tujuan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai

Kartanegara tahun 2016-2021, keterkaitan antara kelompok sasaran dan program adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Sasaran Program Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

Kelompok Sasaran	Diwujudkan dengan Program
1 Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai	1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 4 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
2 Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2 Program Peningkatan Kelayakan Pengoprasian Kendaraan Bermotor 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5 Program peningkatan disiplin aparatur 6 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 7 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.4. Pendanaan Indikatif

Untuk rencana jumlah pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan pada tiap tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang akan diusulkan ke APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016-2021, dan apabila dibutuhkan juga akan di usulkan ke APBD Provinsi Kalimantan Timur serta APBN. Adapun rincian pagu anggaran indikatif untuk tiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021

Terlampir pada halaman berikutnya

5.5. Penerima Manfaat Pembangunan Bidang Perhubungan

5.5.1. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005–2025, Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi dalam 3 (tiga) Wilayah Pembangunan Terpadu (WPT).

Maka dengan demikian penerima manfaat pembangunan di bidang perhubungan pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

a. Wilayah Pengembangan Terpadu I (Wilayah Pantai/Pesisir)

Wilayah ini meliputi 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak dan Marang Kayu. Wilayah ini mempunyai bidang unggulan yaitu perikanan (tambak), pertambangan dan energi serta lokasinya strategis sebagai kawasan industri. Pusat Pelayanan Wilayah adalah Kecamatan Muara Badak.

b. Wilayah Pengembangan Terpadu II (Wilayah Tengah)

Wilayah ini meliputi 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan. Wilayah ini mempunyai bidang unggulan yaitu pertanian tanaman pangan, pariwisata dan pertambangan batu bara. Pusat Pelayanan Wilayah adalah Kecamatan Tenggarong.

c. Wilayah Pengembangan terpadu III (Wilayah Hulu)

Wilayah ini meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu Tabang, Kembang Janggut, Kanohan, Muara Muntai, Muara Wis dan Kota Bangun. Wilayah ini mempunyai bidang unggulan perikanan air tawar, kehutanan dan perkebunan. Pusat Pelayanan Wilayah adalah Kecamatan Kota Bangun.

5.5.2. Masyarakat

Dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan, maka masyarakat penerima manfaat dari pelayanan di bidang

perhubungan pada Kabupaten Kutai Kartanegara adalah semua kalangan masyarakat, yang diantaranya adalah:

- a. Masyarakat pengguna sarana dan prasarana perhubungan;
- b. Masyarakat pengguna prasarana dan fasilitas perhubungan
- c. Masyarakat umum pengguna layanan di bidang perhubungan;
- d. Masyarakat pengguna fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Masyarakat pengguna fasilitas, sarana, dan prasarana perhubungan;
- f. Masyarakat pengguna layanan angkutan umum;
- g. Kelompok masyarakat penyelenggara angkutan umum;
- h. Masyarakat pengguna kendaraan wajib uji;
- i. Masyarakat penyelenggara layanan parkir;
- j. Masyarakat pengguna layanan parkir;

5.5.3. Aparatur Dinas Perhubungan

Kelompok sasaran Aparatur Dinas Perhubungan adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), serta seluruh Tenaga Harian Lepas (THL)/ Pegawai Tdak Tetap/ Honorer yang bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2016-2021												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang)	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Tujuan 1: Menyediakan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Guna Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah	Sasaran 1: Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai	1. Indikator 1: Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	1.1) Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan; 2) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		1.1) Indikator RP/MD: Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	56%	56%		56%		56%		56%		89%		89%		89%		-	
					1.2) Prosentase Cakupan sarana dan prasarana perhubungan (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung)	70%	72%		75%		77%		78%		84%		84%		84%		-	
				1. Pembangunan Terminal	Jumlah Terminal	4			2 Dok	600,000,000	1	2,500,000,000	1	2,500,000,000					2	5,600,000,000	Bidang Darat	
				Pembebasan Lahan untuk pembangunan Jembatan Timbang	Lokasi lahan Pembangunan Jembatan Timbang				± 2,5 Ha	2,500,000,000								± 2,5 Ha	2,500,000,000	Bidang Darat	Jalan Poros Tenggarong-Kota Bangun	
				Pengembangan dan Perluasan Lahan Parkir	Jumlah Lokasi Lahan Parkir yang ditingkatkan/ dikembangkan (Unit)				1 lokasi	2,500,000,000			1 lokasi	2,500,000,000				1 lokasi	5,000,000,000	Bidang Darat	Tenggarong	
				Kajian Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi dan Keterpaduan Sistem Transportasi Antar Moda/ Multi Moda	Jumlah Dokumen (Dokumen)						1 dok	2,000,000,000						1 dok	2,000,000,000	Sekretariat	Kab.Kukar	
				Kajian Penyusunan Green Concept Prasarana Transportasi Darat	Jumlah Dokumen (Dokumen)						1 dok	2,000,000,000						1 dok	2,000,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar	
																		0	-			
				1. Pembangunan Halte	Jumlah Halte													0	-	Bidang Darat		
				1. Pembangunan Pelabuhan Umum Desa Muara Badak Ilir	Jumah Pelabuhan Laut			61,000,000,000	1	120,000,000,000		100,000,000,000		100,000,000,000				1	381,000,000,000	Bidang Laut	Desa Muara Badak Ilir	
				- Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Pelabuhan Umum Kecamatan Muara Badak	Luas Lahan (Hektar)		± 4,5 Ha	2,100,000,000										± 4,5 Ha	2,100,000,000	Bidang Laut	Desa Muara Badak Ilir	
				- AMDAL Pembangunan Pelabuhan Umum Muara Badak	Jumlah dokumen (Dokumen)		1 dok	800,000,000										1 dok	800,000,000	Bidang Laut	Desa Muara Badak Ilir	
				- Study Bangunan Pengalut Sedimen dan Alur Pelayaran Pelabuhan	Jumlah dokumen (Dokumen)				1 dok	2,000,000,000								1 dok	2,000,000,000	Bidang Laut	Desa Muara Badak Ilir	
																		0	-			
				2. Pembangunan Sisi Darat Pelabuhan Laut Samboja	Jumlah Pembangunan Sisi Darat Pelabuhan (Kegiatan)					78,050,704,000	1	126,949,296,000		100,000,000,000				1	305,000,000,000	Bidang Laut	Samboja	
				- Densotape Pelabuhan Samboja	Jumlah densotape pelabuhan (paket densotape)		1	8,000,000,000										1	8,000,000,000	Bidang Laut	Samboja	
				- Kajian Teknis Fungsi Pelabuhan Laut Samboja	Jumlah dokumen (Dokumen)				1 dok	2,000,000,000								1 dok	2,000,000,000	Bidang Laut	Samboja	
				3. Pembangunan Pelabuhan Kuala Samboja	Jumlah Pelabuhan (Pelabuhan)						1	39,000,000,000							0	-		
																		1	39,000,000,000	Bidang Laut	Samboja	

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2016-2021												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang)	Lokal
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				- Penyusunan RIP Dermaga Nelayan Kuala Samboja dan Penetapan DLKR dan DLKP	Jumlah dokumen (Dokumen)		1 dok	800,000,000											1 dok	800,000,000	Bidang Laut	Samboja
				- Review RIP Pelabuhan Laut Samboja	Jumlah dokumen (Dokumen)				1 dok	800,000,000									1 dok	800,000,000	Bidang Laut	Samboja
				4 Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas	Jumlah dokumen (Dokumen)	5 Dokumen			2 dok	1,850,000,000	2 dok	3,500,000,000	1 dok	1,000,000,000					1 dok	6,350,000,000	Bidang Laut	Sanga-Sanga
				- FS Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas	Jumlah dokumen (Dokumen)		1 dok	750,000,000											1 dok	750,000,000	Bidang Laut	Sanga-Sanga
				- AMDAL Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas	Jumlah dokumen (Dokumen)		1 dok	800,000,000											1 dok	800,000,000	Bidang Laut	Sanga-Sanga
				- DED Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas	Jumlah dokumen (Dokumen)				1 dok	1,850,000,000									0	1,850,000,000	Bidang Laut	Sanga-Sanga
				- Penyusunan RIP Pelabuhan Peti Kemas	Jumlah dokumen (Dokumen)						1 dok	1,200,000,000							0	1,200,000,000	Bidang Laut	Sanga-Sanga
				- Kajian Pengembangan Pelabuhan Peti Kemas	Jumlah dokumen (Dokumen)								1 dok	1,350,000,000					0	1,350,000,000	Bidang Laut	Sanga-Sanga
				5 Pembangunan Pelabuhan Marangkayu	Jumlah Pelabuhan (Pelabuhan)							65,000,000,000		32,500,000,000	1	32,500,000,000			1	130,000,000,000	Bidang Laut	
				- Amdal Pelabuhan Marangkayu	Jumlah Dokumen Amdal (Dokumen)	1 Dokumen			1 dok	900,000,000									1 dok	900,000,000	Bidang Laut	Marang Kayu
				- Penyusunan RIP Pelabuhan Marangkayu dan Penetapan DLKR dan DLKP	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	1 Dokumen					1 dok	1,200,000,000							1 dok	1,200,000,000	Bidang Laut	Marang Kayu
																			0	-		
				Kajian Pengembangan Pelabuhan dalam Sistem Transportasi Terpadu di Kab. Kukar	Jumlah Dokumen (Dokumen)		1 dok	1,500,000,000											1 dok	1,500,000,000	Bidang Laut	Kab.Kukar
				SID untuk lokasi Pembangunan Pelabuhan Strategis di Kab. Kukar	Jumlah Dokumen (Dokumen)		1 dok	2,000,000,000											1 dok	2,000,000,000	Bidang Laut	Kab.Kukar
				Kajian Pembangunan Konektivitas Pelabuhan untuk mencapai keseimbangan Pembangunan ekonomi	Jumlah Dokumen (Dokumen)						1 dok	2,000,000,000							1 dok	2,000,000,000	Bidang Laut	Kab.Kukar
				1 Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun	Jumlah Pelabuhan Sungai		1	9,000,000,000											1	9,000,000,000	Bidang Laut	Kota Bangun
				- Kajian Struktur Konstruksi Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Terpadu	Jumlah dokumen (Dokumen)				1 dok	850,000,000									1 dok	850,000,000	Bidang Laut	Kota Bangun
				- Penyusunan RIP, DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpuan Lokal Kota Bangun	Jumlah dokumen RIP, DLKr dan DLKp (Dokumen)		1 dok	1,200,000,000											1 dok	1,200,000,000	Bidang Laut	Kota Bangun
				2 Pengadaan lahan untuk pembangunan peleabuhan di Desa Jongkang	Luas Lahan (Hektar)		1 Hektar	2,143,248,340											1 Hektar	2,143,248,340	Bidang ASDP	Desa Jongkang Kec.Loa Kulu
																			0	-		
				3 DED Pembangunan Dermaga Desa Muara Pantuan Kec. Anggana	Jumlah Dokumen		1 dok	350,000,000											1 dok	350,000,000	Bidang Laut	Desa Muara Pantuan Kec.Anggana
				4 Penyusunan RIP Dermaga Muara Jawa dan Penetapan DLKR dan DLKP	Jumlah dokumen (Dokumen)		1 dok	800,000,000											1 dok	800,000,000	Bidang Laut	Muara Jawa
																			0	-		

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2016-2021												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang)	Lokaal				
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
				5/ Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Bongkar Muat	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)				3 dok	2.500.000.000									3 dok	2.500.000.000	Bidang Laut	Kab. Kukar				
				- FS Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Bongkar Muat	Jumlah Dokumen Amdal (Dokumen)		1 dok	750.000.000													-	750.000.000	Bidang Laut	Kab. Kukar		
				- DED Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Bongkar Muat	Jumlah Dokumen Amdal (Dokumen)				1 dok	1.650.000.000												1 dok	1.650.000.000	Bidang Laut	Kab. Kukar	
				- Amdal Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Bongkar Muat	Jumlah Dokumen Amdal (Dokumen)				1 dok	900.000.000												1 dok	900.000.000	Bidang Laut	Kab. Kukar	
				- Penyusunan RIP Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Bongkar Muat	Jumlah Dokumen						1 dok	700.000.000										-	700.000.000	Bidang Laut	Kab. Kukar	
																						0	-			
				DED, UKL dan UPL Bordes (Tambat Ponton) diperaliran Sungai Wilayah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen DED, UKL dan UPL Bordes (Tambat Ponton) (Dokumen)		1 Dok	1.000.000.000														1 Dok	1.000.000.000	Bidang ASDP	Kab. Kukar	
																						0	-			
				Kajian Penyusunan Green Concept Prasarana Transportasi Air	Jumlah Dokumen (Dokumen)									1 dok	2.000.000.000							1 dok	2.000.000.000	Bidang Laut	Kab. Kukar	
																						0	-			
				1/ Pengadaan dermaga apung Desa Long Ielang Kec. Tabang	Jumlah dermaga apung (Unit)		1	1.000.000.000														1	1.000.000.000	Bidang ASDP	Desa Long Lalang Kec. Tabang	
				2/ Pengadaan Dermaga Apung Desa Kahala Ilir Kec. Kenohan	Jumlah dermaga apung (Unit)		1	900.000.000														1	900.000.000	Bidang ASDP	Desa Kahala Ilir Kec. Kenohan	
				3/ Pengadaan Dermaga ponton desa Sebermban Kec. Muara Wis	Jumlah dermaga apung (Unit)		1	900.000.000														1	900.000.000	Bidang ASDP	desa Sebermban Kec. Muara Wis	
				4/ Pengadaan Dermaga Apung Desa Jantur Kec. Muara Muntai	Jumlah dermaga apung (Unit)		1	900.000.000														1	900.000.000	Bidang ASDP	Desa Jantur Kec. Muara Muntai	
				5/ Pengadaan Ponton Masjid Desa Semayang	Jumlah dermaga apung (Unit)		1	900.000.000														1	900.000.000	Bidang ASDP	Desa Semayang	
				6/ Dermaga Apung (DAK)	Jumlah dermaga apung (Unit)		1	1.272.450.000														1	1.272.450.000	Bidang ASDP	Kab. Kukar	
				7/ Pendampingan Kegiatan Dermaga Apung (DAK)	Kegiatan			127.245.000														0	127.245.000	Bidang ASDP	Kab. Kukar	
				1/ Pembangunan Dermaga Apung/ Ponton	Jumlah Dermaga (Dermaga)								2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000		8	8.000.000.000	Bidang ASDP	Kab. Kukar	
																							0	-		
																							0	-		
								2/ Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;															0	-		
									2.1/ Prosentase Jumlah Prasarana (Terminal, Halte, Peleabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	38%	43%		76%		81%		86%		95%		100%		4.81		-	
								Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal	Jumlah Terminal yang direhab (Terminal)				3	850.000.000			3	850.000.000					6	1.700.000.000	Bidang Darat	Kab. Kukar

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2016-2021												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang)	Lokasi					
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
					Rehabilitas/ Pemeliharaan Halte	Jumlah Halte yang direhab													0	-	Bidang Darat	Kab.Kukar					
					Rehabilitas/ Pemeliharaan Pelabuhan	Jumlah Pelabuhan Laut yang direhab															0	-	Bidang Laut	Kab.Kukar			
					Rehab Dermaga Kecamatan Sebulu	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1	750,000,000													1	750,000,000	Bidang ASDP	Sebulu			
					Peningkatan dan Rehabilitas/ Pemeliharaan Dermaga	Jumlah Dermaga yang ditingkatkan dan direhab (Dermaga) 3			3	1,750,000,000				3	1,500,000,000						6	3,250,000,000	Bidang ASDP	Kab.Kukar			
					Rehabilitas/ Pemeliharaan Dermaga Apung/ Ponton	Jumlah Dermaga Apung/ Ponton yang direhab/ pemeliharaan					200,000,000								200,000,000			0	400,000,000	Bidang ASDP	Kab.Kukar		
						2.2) Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (Traffic/ Warning Light, Rambu Lalin, Pagar Pengaman Jalan, dan Marka Jalan) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	8%	9%			27%			45%			63%			86%		100%		100%	-		
					Rehabilitas/ Pemeliharaan Traffic/ Warning Light	Jumlah Traffic/ Warning Light yang direhab/ pemeliharaan						150,000,000			150,000,000			150,000,000			150,000,000		0	600,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar	
					Rehabilitas/ Pemeliharaan Rambu Lalin	Jumlah Rambu Lalin yang direhab/ pemeliharaan						200,000,000			200,000,000			200,000,000			200,000,000		200,000,000	0	1,000,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar
					Pemeliharaan Traffic Light, Warning Light dan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pemeliharaan Unit Tiang	16 Unit	400,000,000															16 Unit	400,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah perawatan Traffic Light, Warning Light, dan LPUU (30 Jumlah Pemeliharaan)	30	800,000,000															30	800,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar	
					Rehabilitas/ Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	Jumlah Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) yang direhab/ pemeliharaan									150,000,000					150,000,000			0	300,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar	
					Pemeliharaan Marka Jalan	Jumlah pemeliharaan marka jalan							200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	0	1,000,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar		

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2016-2021												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang)	Lokaal		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
					2.3) Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (LPJU) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	0%	0%		20%		40%		60%		80%		100%		100%	-				
				Rehabilitasi/ Pemeliharaan LPJU	Jumlah LPJU yang direhab/ pemeliharaan				500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	0	2,500,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar			
					2.4) Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (Rambu Sungai dan Laut) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	0%	0%		18%		54%		89%		100%		100%		100%	-				
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)	Jumlah fasilitas lalu lintas ASDP yang dipelihara (15 Unit)			15	600,000,000	15	600,000,000	15	600,000,000	15	600,000,000	15	600,000,000	15	600,000,000	Bidang ASDP	Kab.Kukar			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Laut	Jumlah fasilitas lalu lintas laut yang dipelihara (Unit)					13	6,500,000,000				6,500,000,000			-	6,500,000,000	Bidang Laut	Kab.Kukar			
					2.5) Prosentase Jumlah Alat Uji Kendaraan yang dilakukan Kalibrasi dan Perawatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-				
				Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji yang dipelihara / Kalibrasi (Unit) 10 Unit Alat Uji		10	250,000,000	10	250,000,000	10	250,000,000	10	250,000,000	10	250,000,000	10	250,000,000	10	250,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar		
																			0	-				
					2.6) Prosentase Jumlah Prasarana (Gedung Kantor/ Tempat Kerja/Rumah Dinas) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	33%	33%		67%		100%		100%		100%		100%		100%	-				
				Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi (Unit)			1	1,850,000,000											1	1,850,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar	
																				0	-			
																				0	-			

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2016-2021												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang)	Lokal
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2) Indikator 2: Presentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	3) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		3.1) Indikator RPJMD: Kelengkapan rambu-rambu lalu lintas menuju obyek wisata (sesuai RPDA)	0%	0%		24%		71%		95%		100%		100%		100%	-	Bidang Darat	Kab.Kukar
				Inventarisasi kebutuhan fasilitas lalu lintas menuju obyek wisata	Jumlah Dokumen				400,000,000								0	400,000,000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar		
				Pengadaan fasilitas lalu lintas menuju obyek wisata	Jumlah Fasilitas					1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000			0	3,000,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar		
					3.2) Indikator RPJMD: Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (menuju Bandara)	0%	0%		20%		40%		60%		80%		100%		100%	-		
				Inventarisasi kebutuhan fasilitas lalu lintas menuju Bandara	Jumlah Dokumen				200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000			0	800,000,000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar	
				Pengadaan fasilitas lalu lintas menuju Bandara	Jumlah Fasilitas					800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000	0	3,200,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar		
					3.3) Presentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (Rambu Lalu Lintas, Traffic/Warning Light, Pagar Pengaman Jalan, Marka Jalan)	21%	25%		41%		63%		82%		95%		100%		100%	-		
				Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas Bidang Perhubungan	Jumlah Dokumen		1	2,000,000,000	1	2,000,000,000								2	4,000,000,000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar	
				Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas					1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		850,000,000		850,000,000	0	4,700,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar	
				Transportasi Perhubungan (DAK)				511,020,000										0	511,020,000	Bidang Darat	Kab.Kukar	
				Pendampingan Transportasi Perhubungan (DAK)				51,102,000										0	51,102,000	Bidang Darat	Kab.Kukar	
																		0	-			
				Amdal Jalan	Jumlah Dokumen						1	1,000,000,000			1	1,000,000,000			2	2,000,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar
				Pengadaan perlengkapan Fasilitas lalu lintas	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas			850,000,000									0	850,000,000	Bidang Darat	Marang Kayu dan Muara Badak	
				Pengadaan Papan Nama Jalan	Tersedianya Papan Nama Jalan	Jumlah Papan Nama Jalan								750,000,000					0	750,000,000	Bidang Darat	Tenggarong

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2016-2021												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang)	Lokaal				
							2016		2017		2018		2019		2020		2021									
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
				Monitoring ,pendataan dan inventarisir fasilitas lalu lintas	JumlahMonitoring dan pendataan fasilitas lalu lintas	Jumlah Monitoring dan pendataan fasilitas lalu lintas				250,000,000						250,000,000			0	500,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar				
								FS dan DED Area Traffic Center System (ATCS)	2 Dokumen FS dan DED ATCS					2	1,200,000,000						2	1,200,000,000	Sekretariat (Program)	Yenggarong		
								Pengadaan Traffic Light/ Warning Light	Jumlah Traffic Light (14 unit)				1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000		0	6,000,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar		
								Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Jumlah Pagar Pengaman Jalan				600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000		0	2,400,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar		
								Pengcetakan Marka Jalan dan Pemasangan Paku Jalan	Luas Marka Jalan dan Jumlah Paku Jalan (Marka: 3200 M2 dan Paku marka: 800 Buah)				1,100,000,000		1,200,000,000		1,200,000,000		1,200,000,000		0	4,700,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar		
									3.4) Prosentase Cakupan Keteresediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LPJU)	0%	1%			15%		44%		73%		92%		100%		100%	-	
								Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Smart System	Jumlah LPJU (Unit)		75 Unit	3,000,000,000										75 Unit	3,000,000,000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar	
								Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jumlah LPJU (Unit)				130	5,000,000,000	130	5,000,000,000	130	5,000,000,000	130	5,000,000,000	130	5,000,000,000	650	25,000,000,000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar
																						725				
									3.5) Prosentase Cakupan Keteresediaan Fasilitas Lalu Lintas Sungai dan Laut (Rambu Sungai dan Laut)	87%	88%			90%		96%		98%		100%		100%		100%	-	
								Pengadaan lampu Rambu Suar di Alur Pelayaran Danau Semayang dan Melintang	Jumlah Lampu Rambu Suar		5 Unit	315,000,000										5 Unit	315,000,000	Bidang ASDP	Danau Semayang dan Melintang	
								Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Tersedianya rambu rambu sungai (40 unit)		20	275,000,000			20	275,000,000						40	550,000,000	Bidang ASDP	Kab.Kukar	
								Pengadaan Rambu Laut/ Mercusuar	Jumlah Rambu Laut/ Mercusuar													0	-	Bidang Laut	Kab.Kukar	
								Pembangunan Rambu Suar	Jumlah Rambu Suar (31 unit)		5	1,500,000,000	5	1,500,000,000	5	18,381,408,000	5	1,500,000,000	5	1,500,000,000	6	1,500,000,000	31	25,881,408,000	Bidang Laut	Kab.Kukar
																</										

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2016-2021												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang)	Lokaal
							2016		2017		2018		2019		2020		2021					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Sosialisasi/penyuluhan Kebijakan di bidang Perhubungan Darat	Jumlah peserta Sosialisasi/penyuluhan			150 Orang	250.000.000					150 Orang	250.000.000	150 Orang	250.000.000	150 Orang	250.000.000	Bidang Darat	Kab.Kukar
					Pelaksanaan Pengawasan keselamatan Pelayaran Angkutan sungai danau dan penyeberangan	Jumlah Kasus	15 Kasus	200.000.000	15 Kasus	200.000.000	15 Kasus	200.000.000	15 Kasus	200.000.000	15 Kasus	200.000.000	15 Kasus	200.000.000	15 Kasus	200.000.000	Bidang ASDP	Kab.Kukar
					Sosialisasi Keselamatan LLASDP	Jumlah Kecamatan			1	200.000.000.00					1	200.000.000.00			2	400.000.000	Bidang ASDP	Kab.Kukar
					Pengawasan Secara Berkala Prasarana Penunjang Untuk Keselamatan Pelayaran di alur Pelayaran	Terlaksananya kegiatan pengawasan (Kecamatan)	12 kec	200.000.000	12 kec	200.000.000	12 kec	200.000.000	12 kec	200.000.000	12 kec	200.000.000	12 kec	200.000.000	12 kec	200.000.000	Bidang Laut	Kab.Kukar
					Pemeriksaan dan Uji Konstruksi Kapal	Jumlah Kapal	150 Kapal	150.000.000			150 Kapal	150.000.000			150 Kapal	150.000.000			150 Kapal	150.000.000	Bidang Laut	Kab.Kukar
																		0	-	0	-	
Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Sasaran 2: Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1 Indikator 1: Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan	4 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		4.1) Indikator RPJMD: Jumlah arus penumpang angkutan umum	3,000	3,100		3,200		3,300		3,400		3,600		3,600		3,600	-		
					4.2) Cakupan pelayanan angkutan sesuai SPM	25%	25%		38%		50%		63%		100%		100%		100%	-		
					4.3) Rasio Ijin Trayek (Indikator RPJMD)	0.061%	0.061%		0.062%		0.064%		0.066%		0.068%		0.070%		0.070%	-		
					Studi Penerapan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan	Jumlah Dokumen			1	250.000.000								1	250.000.000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar	
					Inventarisasi kegiatan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan	Jumlah Dokumen			1	250.000.000		1	250.000.000					2	500.000.000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar	
					Pemberdayaan penyelenggara jasa angkutan umum melalui pemberian Subsidi Angkutan Umum	Jumlah Angkot				500.000.000			500.000.000			500.000.000	0	1.500.000.000	Bidang Darat	Kab.Kukar		
					Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah Kegiatan				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	0	1.750.000.000	Bidang Darat	Kab.Kukar
					Manajemen pengelolaan data dan informasi bidang perhubungan	Jumlah Dokumen			1	200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	1	1.000.000.000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar
					Pembuatan Profil Dinas dalam bentuk audio visual	Jumlah profil (paket)				150.000.000						150.000.000			0	300.000.000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar
					Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi/Software Sistem Informasi Manajemen dan website	Jumlah Aplikasi				175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	0	875.000.000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar
					Pemeliharaan dan Peningkatan Instalasi Jaringan dan Perangkat Keras/ Hardware IT	Jumlah Jaringan dan Perangkat Keras/Hardware IT (6 Jaringan dan Perangkat Keras)			6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	30	1.250.000.000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar
					Update Data Base Sistem Informasi Manajemen dan Website	Jumlah Data Base			4 Data Base	150.000.000.00	4 Data Base	150.000.000.00	4 Data Base	150.000.000.00	4 Data Base	150.000.000.00	4 Data Base	150.000.000.00	4 Data Base	150.000.000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2016-2021												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang)	Lokaal
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Penyusunan rencana induk/ Masterplan penerapan sistem informasi teknologi bidang Perhubungan	Jumlah Dokumen				1 dok	1.200.000.000									1 dok	1.200.000.000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar
				Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi teknis perhubungan darat, ASDP, dan Laut (Kegiatan)		3 Bidang	577.186.100.00	4 Bidang	600.000.000.00	4 Bidang	600.000.000.00	4 Bidang	600.000.000.00	4 Bidang	600.000.000.00	4 Bidang	600.000.000.00	4 Bidang	600.000.000.00	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar
				Study Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab.Kukar	Tersedianya dokumen rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan periode tahun 2017-2037 (Dokumen)				1 dok	1.500.000.000									-	1.500.000.000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar
				Lanjutan Pemetaan Alur Anak Sungai Mahakam pada daerah Kritis	Jumlah Dokumen (Dokumen)						1 dok	2.500.000.000							1 dok	2.500.000.000	Bidang Laut	Kab.Kukar
				Pendataan Bandara Khusus dan Tempat pendaratan Helicopter	Jumlah Bandara Khusus dan Tempat pendaratan Helicopter di Kukar (Dokumen)				1 dok	100.000.000									-	100.000.000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar
				Pengembangan Sistem Informasi Geografis (GIS) Perhubungan	Tersedianya Sistem Informasi Geografis Perhubungan (Software)		1 Software	213.000.000											1 Software	213.000.000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar
				Penyusunan Naskah Akademis Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara	Tersedianya Naskah Akademis (Dokumen)				1 dok	150.000.000									-	150.000.000	Sekretariat (Program)	Loa Kulu
																			0	-		
				Survey LHR	Jumlah data LHR			-	1 dok	250.000.000			1 dok	250.000.000			1 dok	250.000.000	1 dok	750.000.000	Bidang Darat	Kab.Kukar
				Kajian Akademis Penyusunan Raperda Pembentukan Bidang, dan UPT	Jumlah dokumen penyusunan pembentukan bidang perhubungan udara, UPT, PKB dan UPT, Parkir (Dokumen)		2 dok	500.000.000						500.000.000				500.000.000	2 dok	1.500.000.000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar
																			0	-		
				Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mud/ awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah sopir/ juru mud/ awak kendaraan					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	-	750.000.000	Bidang Darat	Kab.Kukar
				Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	-	750.000.000	Bidang Darat	Kab.Kukar
				Kajian Penyusunan Daya Saing Industri Pelayaran dan Evaluasi Indikator Kinerja Angkutan Laut	Jumlah Dokumen (Dokumen)	1 Dokumen						1.000.000.000							0	1.000.000.000	Bidang Laut	Kab.Kukar
				Analisa Peran dan Potensi Sektor Transportasi Sungai mendukung Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen (Dokumen)	1 Dokumen						1.000.000.000							0	1.000.000.000	Bidang Laut	Kab.Kukar
																			0	-		
				Penunjang Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Jumlah piala, penghargaan		1 piala	600.000.000	1 piala	400.000.000	1 piala	400.000.000	1 piala	400.000.000	1 piala	400.000.000	1 piala	400.000.000	1 piala	400.000.000	Bidang Darat	Kab.Kukar

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2016-2021												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang)	Lokaal			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
				Subsidi Angkutan Umum	Jumlah Angkutan Umum yang disubsidi				25 Angkutan	1,450,000,000	25 Angkutan	1,450,000,000	25 Angkutan	1,450,000,000	25 Angkutan	1,450,000,000	25 Angkutan	1,450,000,000	25 Angkutan	1,450,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar			
				Rakomis Dinas Perhubungan Se Kalimantan Timur	Jumlah Kegiatan					1 keg	750,000,000						1 keg	750,000,000			1 keg	750,000,000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar	
				Penyusunan Buku Transportasi Dinas Perhubungan Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen					1,000,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	-	1,800,000,000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar
																				0	-				
				Pengerukan Alur Pelayaran Sungai dan Danau	Jumlah Luasan Yang Dikeruk				12 M3	40,000,000,000.00	10 M3	35,000,000,000.00								12 M3	75,000,000,000	Bidang Laut	Muara Wis, Muara Muntai		
				Pengerukan Sungai Belayan	Jumlah Luasan Yang Dikeruk							20000 M3	160,000,000,000							20000 M3	160,000,000,000	Bidang Laut	Tabang		
				Normalisasi Alur Sungai	Luas Sungai					1,500,000,000		1,500,000,000					1,500,000,000			0	4,500,000,000	Bidang Laut	Kab.Kukar		
				DED Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Umum Muara Badak								1,000,000,000								0	1,000,000,000	Bidang Laut	Muara Badak		
				Amdal Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Umum Muara Badak								1,000,000,000								0	1,000,000,000	Bidang Laut	Muara Badak		
																				0	-				
																		0	-						
																			0	-					
		2	Indikator 2: Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji	5	Program Peningkatan Kelengkapan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		5.1) Prosentase Jumlah kendaraan yang di uji terhadap Jumlah kendaraan wajib diuji	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-			
							5.2) Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KJR) (Indikator RPJMD)	± 25 Menit/ Kendaraan	± 25 Menit/ Kendaraa n		± 25 Menit/ Kendaraa n		± 25 Menit/ Kendaraa n		± 25 Menit/ Kendaraa n		± 25 Menit/ Kendaraa n		± 25 Menit/ Kendaraa n		± 25 Menit/ Kendaraa n	-			
							5.3) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rata-Rata) (Indikator RPJMD)	56,667	56,667		56,667		56,667		56,667		56,667		56,667		56,667	-			
							Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal,dll)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-			
																						-			
						Sosialisasi dan razia pelanggaran lalu lintas di jalan	Jumlah Sosialisasi dan razia					250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	0	1,250,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar	
						Pengadaan material PKB, Parkir Kendaraan bermotor dan retribusi tambat kapal	Jumlah Cetakan	7 Cetakan	350,000,000	7 Cetakan	600,000,000	7 Cetakan	650,000,000	7 Cetakan	700,000,000	7 Cetakan	750,000,000	7 Cetakan	750,000,000	7 Cetakan	750,000,000	7 Cetakan	750,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar
																					0	-			
						Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dan Perlengkapan Petugas Uji	Banyaknya alat pengujian dan Perlengkapan petugas uji					3,500,000,000							1,000,000,000		0	4,500,000,000	Bidang Darat	Kab.Kukar	

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2016-2021												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang)	Lokal		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB)	Jumlah Aplikasi		1 Aplikasi	250,000,000											1 Aplikasi	250,000,000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar		
				Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB)	Jumlah Aplikasi				150,000,000				150,000,000		150,000,000			0	450,000,000	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar			
																		0	-					
																		0	-					
																		0	-					
		3 Indikator 3: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																			
		4 Indikator 4: Nilai evaluasi LKJP																						
		5 Indikator 5: Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan																						
			</																					

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2016-2021												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang)	Lokaal	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jasa			5,000,000		5,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000	0	34,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			561,104,640		600,000,000		750,000,000		750,000,000		800,000,000		800,000,000	0	4,261,104,640	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan			800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000	0	4,800,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor			300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	0	1,800,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			178,860,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	0	1,178,860,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	0	1,200,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan			225,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	0	1,475,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			80,000,000		80,000,000		80,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	0	540,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			40,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	0	340,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor			100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	0	600,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman			150,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	0	1,150,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi di Dalam Daerah dan ke Luar Daerah			400,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000	0	3,400,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
				Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	12 bin	2,980,521,920	12 bin	2,634,740,160	12 bin	2,634,740,160	12 bin	2,634,740,160	12 bin	2,634,740,160	12 bin	2,634,740,160	12 bin	2,634,740,160	12 bin	2,634,740,160	Sekretariat (Program)	Kab.Kukar
				Penyediaan Jasa Publikasi dan Informasi	Jumlah Kegiatan Pameran		275,000,000.00		275,000,000.00		275,000,000.00		275,000,000.00		275,000,000.00		275,000,000.00		275,000,000.00	0	1,650,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar
				Penataan Kearsipan	Data Base Arsip (Aplikasi)		167,720,000		150,000,000		167,720,000		150,000,000		167,720,000		150,000,000		150,000,000	0	953,160,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar
																			0	-			
				8.1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.1) Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional					2,500,000,000				1,000,000,000				1,000,000,000	0	4,500,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor					600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000	0	3,000,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor			600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000	0	3,600,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar		
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor			300,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000	0	2,050,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			600,000,000		600,000,000		600,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000	0	4,200,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar		
			Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi gedung kantor					250,000,000		250,000,000				250,000,000			0	750,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar		

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2016-2021												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang)	Lokasi		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah Rehabilitasi kendaraan dinas/operasional							250,000,000				250,000,000			0	500,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar		
				Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor			4,250,000,000				1,000,000,000				1,000,000,000			0	6,250,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Tenggarong		
			9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	0	-			
						9.1) Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		-		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		400 stel	400,000,000	410 stel	500,000,000	410 stel	500,000,000	410 stel	500,000,000	410 stel	500,000,000	410 stel	500,000,000	#VALUE!	2,900,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
					Pengadaan Pakaian Khusus di Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus di Hari-Hari Tertentu				410 stel	300,000,000			410 stel	300,000,000			410 stel	300,000,000	#VALUE!	900,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
			10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	0	-			
						10.1) Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	72%	75%		78%		82%		85%		96%		100%		100%		-		
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta mengikuti Pelatihan, Bimtek, Workshop, dll	Diklat Teknis, Bimtek, Pelatihan, Workshop		300,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000	0	4,300,000,000	Sekretariat (Umpeg)	Kab.Kukar	
																				0	-			
Jumlah							128,673,580,000		317,860,444,160		617,484,164,160		280,980,740,160		82,598,460,160		32,130,740,160		1,459,728,128,800					

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Perumusan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021 disusun dalam tabel berikut:

Tabel. 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I	Tujuan Misi 5 RPJMD: Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah								
	Sasaran: Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan								
	Indikator Sasaran: Cakupan aksesibilitas antar wilayah		10%	40%	60%	75%	90%	100%	100%
II	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah								
	Urusan Wajib Perhubungan								
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3,000	3,100	3,200	3,300	3,400	3,500	3,600	3,600
	- Bidang Darat	1,000	1,050	1,100	1,150	1,200	1,250	1,300	1,300
	- Bidang ASDP dan Laut	2,000	2,050	2,100	2,150	2,200	2,250	2,300	2,300
2	Rasio ijin trayek	0.00061	0.00061	0.00062	0.00064	0.00066	0.00068	0.00070	0.00070
	- Jumlah Ijin Trayek	65	65	67	69	71	73	75	75
	- Jumlah Penduduk Kec.Tenggarong	107,363							
3	Jumlah uji kir angkutan umum	10,000	11,000	12,000	13,000	14,000	14,000	14,429	14429

4	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan
5	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rata-Rata)	Rp 56,667	Rp 56,667	Rp 56,667	Rp 56,667	Rp 56,667	Rp 56,667	Rp 56,667	Rp 56,667
	1) JBB s.d 3000Kg	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 40,000
	2) JBB > 3001 s.d 8000 Kg	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 60,000
	3) JBB > 8001	Rp 70,000	Rp 70,000	Rp 70,000	Rp 70,000	Rp 70,000	Rp 70,000	Rp 70,000	Rp 70,000
6	Persentase kontribusi PAD sektor perhubungan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Jumlah kontribusi PAD sektor perhubungan	1,311,412,140	1,311,412,140	1,311,412,140	1,311,412,140	1,311,412,140	1,311,412,140	1,311,412,140	1,311,412,140
7	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	1	-	-	-	-	-	2	2
8	Kelengkapan rambu-rambu lalu lintas menuju obyek wisata (sesuai RIPDA)	44	0%	0%	24%	71%	95%	100%	100%
	- Rambu yang sudah ada	-	-	-	25	75	100	105	105
	- Rambu yang seharusnya ada	105							
9	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (menuju Bandara)	-	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
	- Rambu yang sudah ada	-	-	20	40	60	80	100	100
	- Rambu yang seharusnya ada	100							
10	Cakupan Ketersediaan Rambu-rambu Jalan Raya	29%	29%	48%	72%	92%	99%	100%	100%

- Rambu yang sudah ada	1,525	1,525	2,525	3,775	4,775	5,175	5,210	5,210
- Rambu yang seharusnya ada	5,210							

Cara pengisian tabel:

Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian indikator.

Kolom (2) diisi dengan uraian indikator kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Kolom (3) diisi dengan data capaian pada awal tahun periode RPJMD untuk setiap indikator kinerja

Kolom (4) sampai dengan kolom (8) diisi dengan besaran yang ditargetkan untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing tahun berkenaan

Kolom (9) diisi dengan besaran yang ditargetkan tercapai pada akhir tahun periode RPJMD untuk setiap indikator kinerja SKPD

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

Tabel. 6.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan

No.	Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi	Satuan
1	2	3	4	5
1	Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai	1) Prosentase sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	Jumlah (komulatif) sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia dibagi jumlah sarana, prasarana dan fasilitas yang seharusnya tersedia dikali 100%	%
		2) Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	Jumlah Fasilitas yg tersedia dibagi jumlah Fasilitas yang seharusnya tersedia dikali 100%	%
2	Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1) Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji	Jumlah (pertahun) kendaraan yang diuji (lulus uji) dibagi jumlah kendaraan wajib uji dikali 100%	%
		2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai (pertahun) hasil survey dan perhitungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan	Kuantitas & Kualitas
		3) Nilai evaluasi LKjIP	Hasil penilaian (pertahun) oleh Inspektorat Kab. Kukar	Kuantitas & Huruf

BAB VII

PENUTUP

Naskah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016–2021, yang akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah di sektor transportasi. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016–2021 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di sector transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder sektor transportasi. Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja (Bidang, Sekretariat, Seksi, dan Subbag) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 s.d 2021 dan menjadi acuan bagi semua unit kerja (Bidang, Sekretariat, Seksi, Subbag, serta UPT) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

3. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 s.d. 2021 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 s.d. 2021 khususnya sektor transportasi.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban menjaga konsistensi antara Renstra dengan Rencana Kerja (Renja) tahunan 2016 s.d. 2021.
5. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, masing-masing Unit Kerja (Bidang, Sekretariat, Seksi, Subbag, serta UPT) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renstra dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Dengan demikian kami berharap semoga perencanaan strategis ini tetap dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kutai Kartanegara untuk terwujudnya Visi Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.

Tenggarong, 23 September 2016

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Drs. H. Marsidik
Pembina Utama Muda
NIP. 19620403 198703 1 020



LAMPIRAN 5.1

**Jadwal Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021**

Lampiran 5.1

**Agenda Kerja
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2016-2021**

NO	Tahapan Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA																
1	Orientasi mengenai Renstra																
2	Pengumpulan Data dan Informasi																
B.	PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA																
1	Perumusan Rancangan Renstra																
2	Penyajian Rancangan Renstra																
3	Penetapan RPJMD																
C.	PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA																
1	Perumusan Rancangan Akhir Renstra																
2	Penyajian Rancangan Akhir Renstra																
D.	PENETAPAN RENSTRA																
1	Penyampaian dan Verifikasi Rancangan Akhir Renstra kepada Bappeda																
2	Perbaikan Rancangan Akhir Renstra (hasil verifikasi)																
3	Penerbitan SK Bupati tentang Pengesahan Renstra																
4	Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas																